

OPOSISI BERSERAGAM: Catatan tentang Hubungan Politik Suharto dan Militer di Akhir 1980-an

*Dwi Pratomo Yulianto**

Abstract

In playing its predominant role in Indonesia politics during the New Order era, the military, in fact, suffered from inter-group rivalry. The emerging ballance of power among the competing factions, on the one hand allowed Suharto to keep control the military and on the other hand complicates president's relation to the military. The order to win internal struggle for power within the military faction, one of them invite more political openness and encourage a wider opposition. The competing faction eventually gained nothing.

Kata-kata kunci: *Politik dan militer; oposisi; persaingan kelompok*

Pengantar

Tulisan ini berkisah tentang dinamika politik elit di Indonesia antara pertengahan 1980-an sampai pertengahan 1990-an. Periode ini dapat dikatakan sebagai periode krisis terbesar dalam masa kekuasaan Soeharto. Pada periode ini Soeharto menghadapi perlawanan politik dari kalangan militer¹ yang selama ini menjadi

* *Dwi Pratomo Yulianto* adalah alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UGM Yogyakarta.

¹ 'Militer' di sepanjang tulisan ini menunjuk kelompok yang mengasosiasikan diri dan kepentingannya sebagai militer. Kelompok ini sangat beragam kepentingannya. Di

pengawal kekuasaannya. Perlawanan ini berangkat dari kekecewaan kalangan militer terhadap kinerja Soeharto sejak awal 1980-an, dan baru dapat dipulihkan pertengahan 1990-an ketika ia kembali menggenggam militer dan menemukan basis kekuasaan politik baru.

Tulisan ini diawali dengan sebuah diskusi tentang pergeseran kekuasaan politik di sejak awal Orde Baru sampai memasuki tahun 1980-an. Pada periode ini kekuatan politik militer —sebagai lembaga maupun komunitas— makin merosot, dan kekuasaan pun kian terkonsentrasi di tangan Soeharto pribadi. Memasuki 1980-an kemerosotan tersebut semakin menjadi, sebagian karena Soeharto ingin melepaskan ketergantungannya pada dukungan militer, dan sebagian lain karena kebijakan-kebijakan Soeharto pasca *oil boom* yang banyak merugikan kalangan militer. Kekecewaan kalangan militer pun semakin menjadi, dan kemudian meledak dalam bentuk perlawanan politik terhadap keinginan-keinginan politik Soeharto maupun para pembantu terdekatnya. Dalam hal ini, perlu ditegaskan peranan Moerdani sebagai *rallying point* perlawanan tersebut.²

Selanjutnya akan diskusikan langkah-langkah politik Soeharto dalam mengkonsolidasikan ulang kekuasaannya, saat militer menjadi salah satu sasarannya. Soeharto pun mengambil langkah-langkah 'personilasi dan deinstitutionalisasi' tentara dengan campur tangan secara besar-besaran dalam hal promosi kepangkatan dan mutasi jabatan elit militer. Mereka yang dianggap 'terkontaminasi' Moerdani disingkirkan dan digantikan mereka yang memiliki kedekatan pribadi dengan Soeharto. Pada bagian terakhir ditarik kesimpulan dari fenomena politik dalam periode tersebut, dan diuraikan akibat-

dalamnya juga tercakup para purnawirawan dan cenderung berkiblat ke markas besar sebagai antithesis terhadap para perwira dan purnawirawan lainnya yang cenderung berkiblat ke Soeharto. Menghadapi kinerja politik Soeharto dalam dekade 1980-an ini mereka seakan menemukan momen tepat untuk 'bekerja sama'.

² Perlu dicatat bahwa sikap kritis kalangan militer terhadap Soeharto tidak dapat dikatakan semata-mata karena Moerdani. Hal ini karena tidak semua yang bersikap kritis dapat digolongkan sebagai 'orangnya' Moerdani, karena tak semua laju kariernya ditentukan oleh Moerdani dan memiliki kedekatan pribadi dengannya. Meski demikian harus diakui bahwa mantan Pangab tersebut telah menjadi *center* dari tumbuhnya sikap oposisi di kalangan militer.

akibatnya terhadap kondisi politik Indonesia pada menjelang dan pasca kejatuhan Soeharto pada tahun 1998.

Pergeseran Kekuasaan di Masa Orde Baru

Sejak awal Orde Baru tentara telah menjadikan dirinya sebagai bagian dari atau bahkan kekuasaan, yang terlihat dengan ekspansi masif peranan tentara dalam bidang-bidang non kemiliteran dan upaya menggunakan segala instrumen dan mekanisme yang dimiliki untuk menjaga kelangsungan politik. Di masa ini terjadi perluasan makna 'urusan internal tentara', selain dalam arti klasik; masalah teknis pertahanan dan kebijakan personalia militer, juga tercakup di dalamnya 'klaim' militer atas posisi politik dan pemerintahan serta ekonomi.³

Dominasi militer atas pemerintahan ini terlihat dari banyak orang militer yang dikaryakan pada jabatan-jabatan publik di berbagai bidang dan tingkatan.⁴ Secara ekonomi, militer mengembangkan bisnis berskala besar yang dirintis sejak 1950-an ketika mengambil alih pengelolaan perusahaan-perusahaan asing yang dinasionalisasi.⁵ Di Orde Baru aktivitas ekonomi militer terlihat dengan duduknya para personelnnya pada posisi-posisi strategis perekonomian⁶ dan dengan semakin giatnya unit-unit bisnis tentara.⁷

³ Hal ini berkaitan dengan adanya doktrin 'Dwifungsi ABRI', yang memberikan landasan doktrinal bagi tentara untuk terlibat dalam urusan-urusan non kemiliteran. Lihat Dwi Prntomo Yulianto, *Pengaruh Aspek Intervensi Pihak Luar dan Aspek Kepemimpinan Terhadap Resistensi Politik TNI. Sebuah Studi tentang Perilaku Politik Militer Indonesia pada Masa Perang Kemerdekaan Awal 1950-an dan Akhir 1980-an*, Skripsi pada Jur. Pemerintahan FISIPOL UGM, tak diterbitkan, 2001.

⁴ Lihat John A. MacDougall, 'Pattern of Military Control in The Indonesian Higher Central Bureaucracy', *INDONESIA* # 33 April 1982, hal 89 - 121. Di samping itu juga memperoleh 20 % kursi parlemen di tingkat pusat maupun daerah. Lihat Ian MacFarling, *The Dual Function of The Indonesian Armed Forces. Military Politics in Indonesia*, Australian Defence Studies Centre, Australia, 1996.

⁵ Lihat Ulf Sundhaussen, *Politik Militer di Indonesia 1945 - 1967. Menuju Dwi Fungsi ABRI*, terj. Hasan Basari, LP3ES, Jakarta, 1988.

⁶ Lihat Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, terj. Th Sumarthana, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1986.

⁷ Lihat Indria Samego, *Bila ABRI Berbisnis. Buku Pertama yang Menyingkap Data dan Kasus*

Militer juga berperan aktif dalam penciptaan iklim politik terkendali dengan membatasi aktivitas politik masyarakat.⁸ Posisi tawar tentara dalam politik pun signifikan. Meskipun posisi Soeharto kuat, terdapat banyak hal yang membatasi kekuasaannya: ia hanya akan eksis dengan dukungan konsensus minimal antara elit militer dan birokrasi.⁹

Namun kekuasaan Soeharto meningkat seiring dengan pertumbuhan Orde Baru. Oil boom pada tahun 1970-an memungkinkannya mengukuhkan kekuasaan pribadinya. Ia mengidentifikasi dirinya dengan 'pembangunan' dan sosok yang mewujudkan 'kesejahteraan rakyat', dengan membagi-bagikan 'Bantuan Presiden' dan 'Instruksi Presiden'.¹⁰ Secara bertahap Soeharto menempatkan dirinya di puncak piramida kekuasaan, dan menciptakan sebuah pelembagaan politik pada level yang rendah — dalam konteks melanggengkan beberapa elemen personal rule— termasuk tiadanya aturan pemilihan presiden mendatang.¹¹ Keberhasilan Soeharto mengurangi ketergantungannya pada tentara setidaknya terlihat dari makin sedikitnya persentase militer di jabatan publik yang digantikan oleh mereka yang memiliki ikatan pribadi dengannya.

Penyimpangan dalam Praktik Bisnis Kalangan Militer, Penerbit Mizan, Jakarta, 1998. Richard Robison, *Indonesia. The Rise of Capital*, Allen&Unwin dan Asian Studies Association of Australia, Sydney, 1986.

⁸ Lihat Yulianto, *Op. Cit.*

⁹ Lihat Karl D. Jackson, 'Bureaucratic Polity: A Theoretical Framework for The Analysis of Power and Communication in Indonesia'. Dalam Karl D. Jackson dan Lucian W. Pye (Eds), *Political Power and Communication in Indonesia*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles-London, 1978.

¹⁰ Lihat Goerge Junus Aditjondro, *Yayasan-yayasan Soeharto: Cakupan, Dampak dan Pertanggung-jawabannya*, tanpa penerbit, New Castle, 1998. Sebenarnya sejak awal Orde Baru gejala ini sudah mulai terlihat, yakni dengan kecenderungan menguatnya Kepresidenan di antara unit-unit birokrasi tertinggi, terutama dalam perumusan kebijakan pembangunan. Hanya saja pada waktu itu pemusatan kekuasaan secara pribadi belum terlihat. Lihat Mohtar Mas'oed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966 - 1971*, LP3ES, Jakarta, 1989.

¹¹ Lihat Raymon William Liddle, 'Soeharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institution', dalam R. William Liddle (ed), *Leadership and Culture in Indonesian Politics*, Asian Studies Association of Australia dan Allen&Unwin, Sydney, 1996, hal 15 - 36.

Soeharto juga berhasil memecah militer: antara para perwira lapangan dengan perwira 'istana'. Sebagaimana seorang sultan Jawa, ia selalu membangun 'kesimbangan politik' di antara parta pembantunya dengan membagi-bagikan posisi-posisi kunci kepada berbagai kelompok yang bersaing,¹² sehingga makin menjadikannya tokoh sentral yang 'maha kuasa', *untouchable*, dan tidak terseret ke dalam putaran konflik. Dengan memainkan 'kartu netral', ia dapat menjaga kelangsungan kekuasaannya karena dengan demikian seluruh elit pembantunya semakin bergantung padanya.

Walaupun tetap mengandalkan dukungan tentara secara keseluruhan,¹³ sebenarnya Soeharto hanya mengandalkan beberapa figur di lapangan keamanan dan intelijen yang terlihat dengan perangkapan beberapa jabatan strategis oleh beberapa perwira,¹⁴ serta pemangkuan jabatan yang sangat lama pada pos-pos tersebut.¹⁵ Kedekatan dengan Soeharto memungkinkan mereka berperan dalam pengambilan keputusan politik tinggi; sesuatu yang sering memicu pertentangan dengan para perwira 'Hankam' yang sering dilangkahi wewenangnya.¹⁶ Soeharto juga menempatkan para perwira yang lemah secara politik pada posisi-posisi strategis.¹⁷

¹² Lihat Harold Crouch, 'Military-Civilian Relation in Indonesia in The Late Soeharto Era', *THE PASIFIC REVIEW* Vol 1 #04, 1988, hal 353 - 362.

¹³ Sejak reorganisasi 1969, secara struktural keseluruhan matra tentara di bawah kendali Presiden. Lihat MacFarling, *Op. Cit.*

¹⁴ *Inner Core Group* di kalangan pembantu Soeharto terdapat beberapa kelompok; Amir Machmud di Depdagri, Ali Moertopo di Opsus, Soedharmono di Setneg dan sebagainya. Namun sejak pertengahan 1970-an sampai awal 1980-an, Moerdani, Yoga Soegomo, Ali Moertopo dan Soedomo adalah yang terdekat; hubungan mereka dengan Soeharto bukan semata-mata bersifat resmi, namun juga personal. Lihat David Jenkins, *Soeharto and His General. Indonesian Military Politics 1975-1983*, Cornell Modern Indonesia Project, South-east Asia Program, Cornell University, Ithaca, New York, 1984.

¹⁵ Misalnya Yogie S. M., sebagai Pangdam Siliwangi 1978-1983 dan Dan Kopassandha 1975-1983. Sedang Darjatmo menjabat Kastaf Karyawan (yang mengendalikan tentara di luar kemiliteran) sejak akhir 1960-an s.d. diangkat sebagai Kastaf Kopkamtib dan Ketua DPR/MPR 1978. Hal di atas, kontras dengan cepatnya rotasi pada jajaran operasional maupun teritorial. Lihat The Editors, 'Current Data on The Indonesian Military Elite', *INDONESIA* # 29 Oktober 1980 (Selanjutnya disebut 'Curent Data..').

¹⁶ Misalnya penggelaran invasi ke Timor Timur yang direncanakan oleh Moerdani dan kelompoknya tanpa sepengetahuan staf operasional Hankam. Beberapa pimpinan yang seharusnya memegang kendali pasukan, sama sekali tidak diberi tahu dan tidak ada di tempat ketika itu. Lihat Jenkins, *Op. Cit.*, hal 25-26.

¹⁷ Misalnya pengangkatan M. Yusuf sebagai Menhankam dan Pangab. Sebagaimana

Puncak pengendalian Soeharto atas militer tercermin dengan pengangkatan Moerdani sebagai Pangab.¹⁸ Pengangkatan ini bukan hanya makin mengukuhkan diri Moerdani sebagai orang terkuat di kalangan pembantu Soeharto, namun juga menunjukkan bahwa Soeharto sudah demikian menguasai militer, sehingga dengan mudahnya menempatkan pilihannya tanpa adanya perlawanan dari tentara (saat itu masih banyak perwira aktif yang lebih senior daripada Moerdani). Ia adalah orang kedua (sebelumnya adalah Soeharto) yang memangku jabatan Pangab dan Pangkopkamtib secara bersamaan. Ia tetap memegang kontrol kekuatan intelijen dengan tetap memimpin langsung Badan Intelijen Strategis (Bais) kendati telah diangkat menjadi Pangab.¹⁹

Demikianlah, sampai dengan awal 1980-an, kekuasaan tertinggi atas Orde Baru telah bergeser dari tentara sebagai sebuah lembaga, atau setidaknya komunitas, ke tangan Soeharto sebagai pribadi. Berbagai penataan politik yang dilakukan dan mengalir deras nya rejeki ekonomi akibat *oil boom*, telah membuat Soeharto menjadi tokoh sentral Rejim Orde Baru yang mampu mewujudkan 'kesejahteraan' bagi masyarakat dan 'tak tergantikan'. Tentara mengalami pergeseran posisi politiknya: dari pihak yang 'menguasai' sistem politik pada akhir 1960-an menjadi sekedar alat kekuasaan Soeharto pada awal 1980-an. Soeharto bukan saja berhasil mengikat tentara, namun juga berhasil membuat lembaga politik terkuat dalam Rejim Orde Baru tersebut benar-benar tak berdaya ketika kewenangannya diserobot begitu saja oleh para 'perwira istana'.

Panggabeian yang Batak dan Protestan, Yusuf adalah perwira lemah politik. Walau populer di kalangan prajurit, sebagai muslim taat dan non Jawa, serta tidak berbasis divisi-divisi utama di Jawa (Siliwangi, Diponegoro dan Brawijaya), ia berpeluang tipis untuk 'menggertak' Soeharto karena sulit memperoleh dukungan dari mayoritas perwira yang Jawa *abangan*. Lihat The Editors, 'Current Data', *INDONESIA* # 29 April 1980.

¹⁸ Moerdani adalah seorang pembantu lama Soeharto, sejak kampanye pembebasan Irian Barat awal 1960-an, penghentian konfrontasi dengan Malaysia, misi-misi intelijen rahasia maupun misi-misi pengamanan kekuasaan Soeharto. Lihat Jenkins, *Ibid*.

¹⁹ Lihat 'Menhankam. 'Dwitunggal' di Merdeka Barat', *TEMPO* 02 April 1988. Bais adalah sebuah badan baru yang dibentuk Moerdani dengan menggabungkan dua satuan intelijen yang sebelumnya ia pimpin, Pusintelsrat (Pusat Intelijen Strategis) dan Intelijen Kopkamtib.

Indonesia di Awal 1980-an

Memasuki 1980-an, Soeharto dapat dikatakan memasuki masa kejayaannya. Secara politis ia telah berhasil mendominasi sistem politik di Indonesia, terutama keberhasilannya dalam menempatkan militer sebagai instrumen kekuasaannya setelah jauh-jauh sebelumnya ia telah berhasil melumpuhkan kekuatan politik sipil maupun *civil society*. Secara ekonomi, ia berhasil membawa Indonesia ke arah kemajuan sangat pesat. Rejeki melimpah dari *oil boom* memungkinkannya melakukan kebijakan ekonomi yang sinterklas dan mercusuar yang telah membuat orang memandangnya identik dengan 'pembangunan' sekaligus dapat mengendalikan perilaku politik para elit militer.

Setelah terpilihnya kembali sebagai presiden pada SU MPR 1983, Soeharto kembali menerapkan 'politik keseimbangan' di antara pembantunya dengan menempatkan dua kelompok elit pada posisi yang saling bersaing, sementara ia memainkan kartu netralnya. Setelah diangkat sebagai Pangab dan Pangkopkamtib, Moerdani segera menata ulang tentara, secara struktural maupun personal, yang berujung pada penempatan dirinya di puncak kepemimpinan kekuatan bersenjata.²⁰ Dengan berbagai penataan tersebut, dapat

²⁰ Moerdani melakukan reorganisasi tentara secara masif pada tahun 1985, ketika beberapa langkah strategis diambil. Di antaranya memangkas jumlah Kodam dan menghapus institusi pertahanan yang dipandang sudah tidak relevan (misalnya Kowilhan), serta menata kembali tata kerja dan hubungan kerja antara berbagai kekuatan pertahanan. Hal ini membuat struktur organisasi menjadi lebih sentralistik dan posisi Pangab menjadi lebih kuat karena rantai komando telah diperpendek. Di samping itu juga dilakukan reorganisasi unit-unit tempur; Kostrad, Kopassus, dan pembentukan unit Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC), yang ditempatkan berada di bawah kendali Pangab langsung. Reorganisasi juga dilakukan terhadap Angkatan Udara dan Angkatan laut, yang kesemuanya berujung pada semakin kuatnya posisi Pangab. Secara personal menempatkan teman-teman terdekatnya pada posisi-posisi strategis serta menyingkirkan mereka yang tidak dapat mengikuti gaya kepemimpinannya. Lihat Anderson, Ben., 'Current Data', *INDONESIA* # 40 Oktober 1985. Ia juga membina para perwira pilihannya untuk dipromosikannya ke dalam lingkaran 'anak emas', serta banyak mempekerjakan aparatur intelijen yang diciptakan sebagai jalan menuju kenaikan pangkat, sesuatu yang membuat dirinya di mata para pengikutnya sebagai tentaranya tentara. Lihat Michael R.J. Vatikiotis, *Indonesian Politics Under Suharto. Order, Development and Pressure for Change*, Routledge, London and New York, 1993.

dikatakan bahwa dia-lah Pangab pertama yang mampu menyatukan seluruh kekuatan secara efektif berada di bawah kendalinya.

Namun Soeharto tak pernah membiarkan seseorang 'besar sendirian'. Ia pun membangun kelompok lain untuk mengimbangnya. Kelompok Sekretariat Negara (Setneg) inilah yang terpilih sebagai pengimbang Moerdani. Tokoh utama kelompok ini adalah Letjen Soedharmono SH, yang telah banyak berkiprah di bidang hukum dan administrasi sejak awal Orde Baru.²¹ Kelompok ini sudah lama membantu Soeharto di bidang ini sejak Soedharmono menjadi Sekretaris Presidium Kabinet pada tahun 1966. Sejak itu kelompok ini merajai bidang administrasi dan hukum, dan tumbuh menjadi sebuah klik politik yang sangat kuat.²² Berakhirnya era *oil boom* merupakan berkah bagi kelompok ini, sehubungan dengan dikeluarkannya sebuah Keppres yang menjadi senjata yang amat ampuh, Keppres No 10/1980 yang menetapkan bahwa semua pengeluaran pemerintah yang nilainya di atas Rp 500 juta harus melalui seleksi Tim Keppres 10 yang berpusat di Setneg.²³ Terjadilah ekspansi peran Tim Keppres 10 ini karena kemudian juga dikeluarkan

²¹ Soedharmono yang lahir di Gresik Jawa Timur 12 Maret 1927, semasa perang kemerdekaan tergabung dalam Tentara Pelajar (Pasukan Tjadangan [Pas. T.] Ronggolawe), dan aktif bergerilya pada perang *clash II* di daerah Wonosobo-Magelang. Setelah perang, ia diangkat menjadi perwira, setelah sebelumnya mengikuti Sekolah Perwira Tjadangan di Yogyakarta. Ia kemudian masuk ke Akademi Hukum Militer di awal 1950-an, dan kemudian berkarier di bidang hukum militer ini sampai dengan diangkat menjadi Sekretaris Presidium Kabinet pada 1966. Posisi Soedharmono kuat saat ia dipercaya sebagai Menteri Sekretaris Negara terlama dalam masa kekuasaan Soeharto, sejak tahun 1972 sampai dengan menjelang 'dipilih' sebagai Wakil Presiden pada SU MPR 1988. Lihat Sudharmono, *Pengalaman dalam Masa Pengabdian. Sebuah Otobiografi*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1997.

²² Untuk pertumbuhan Kelompok Setneg ini, lihat Robinson Pangaribuan, *The Indonesian State Secretary 1945-1993*, Asia Research Centre on Social, Political and Economic Change Murdoch University dan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

²³ Tim Keppres 10 ini diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara Soedharmono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Wakil Ketua Bappenas J.B. Sumarlin sebagai wakil ketua, Krisnamurti Samil sebagai sekretaris, dan Gubernur Bank Indonesia Rachmat Saleh, Dirjen Anggaran Dep. Keuangan Yusuf Ramli, Dirjen Industri Logam Dasar Dep. Perindustrian Hartoyo, Deputi Ketua Bappenas Bidang Ekonomi Saleh Affif dan Ginandjar Kartasasmita sebagai para anggotanya. Lihat Pangaribuan, *Ibid.*, hal 53. Sudharmono, Op. Cit., hal 296 - 297.

beberapa peraturan (Keppres) yang pada intinya memperkuat posisinya.²⁴ Kemudian juga dikeluarkan Keppres no 14 A yang memberikan kesempatan Setneg untuk menjalankan pembangunan ekonomi menurut selernya; mengembangkan kekuatan ekonomi domestik (pribumi).²⁵ Bagi kelompok ini keppres-keppres tersebut dijadikan alat untuk mengintervensi pembelanjaan departemen-departemen lainnya (termasuk militer), dan sebagai alat membangun basis dukungan dan patronase politik, serta sebagai lahan bisnis yang menguntungkan.²⁶

Pada tahun 1983, kelompok ini kembali memperkuat posisinya dengan duduknya beberapa anggotanya dalam kabinet Soeharto yang baru.²⁷ Pada Oktober tahun itu, Soedharmono

²⁴ Menurut Winters, beberapa peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk memperkuat tim ini; Keppres No. 42, yang memberikan kewenangan tim ini mengontrol seluruh perusahaan negara, Keppres No. 18, yang memberikan kekuasaan memaksa pemerintahan di daerah (propinsi) mengadopsi model pusat serta bagaimana mereka harus merujuk daftar rekanan yang telah ditetapkan pusat, Keppres No. 20, yang bertujuan menguatkan kontrol dan supervisi tim ini atas kebijakan pembangunan di daerah dengan membentuk semacam tim koordinasi pengendalian dan supervisi pembangunan di daerah. Tim daerah ini berwenang memerintahkan dan menasehati pemerintahan lokal dalam proyek-proyek 'kelompok ekonomi lemah', serta wajib membuat pelaporan secara periodik ke tim pusat. Keppres No 29/1984 menetapkan diturunkannya batasan kontrol tim atas lembaga dan departemen pemerintah dari Rp 500 juta ke Rp 200 juta. Untuk lengkapnya, lihat Jeffrey A. Winters, *Power in Motion. Capital Mobility and The Indonesian State*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1996, hal 131 - 132.

²⁵ Awalnya, ketentuan yang tertuang dalam Keppres No 14/1979 secara eksplisit menekankan keberpihakan pada pihak kekuatan ekonomi 'pribumi'. Namun ketika diperbaharui dengan Keppres no 14A/1980, terminologi 'pribumi' digantikan dengan 'golongan ekonomi lemah guna mengeliminasi sentimen rasial. Lihat pangaribuan, *Op. Cit.*, hal 52. Namun telah menjadi rahasia umum, terminologi tersebut selalu menunjuk pada para pengusaha pribumi. Berbasiskan kewenangan Tim Keppres 10, upaya ini memperoleh kesempatan emas; misalnya ketentuan bagi pemenang tender dari luar negeri untuk mengusahakan subkontrak atau kerja sama dengan pengusaha lokal. Lihat Sudharmono, *Op. Cit.*, hal 305.

²⁶ Lihat Pangaribuan, *Op. Cit.*, Winters, *Ibid*.

²⁷ Soedharmono menjadi Menteri Negara Sekretaris Negara terlama dalam masa pemerintahan Soeharto; Moerdiono menjadi Menteri Muda Sekretaris Negara; Ginadjar Kartasasmita menjadi Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri. Sementara kawan dekat Soedharmono, Ismail Saleh menjadi Jaksa Agung, dan Ali Said menjadi Menteri Kehakiman. Lihat KOMPAS, 17 Maret 1983.

'dipercaya' memimpin Golkar.²⁸ Sebagaimana kepemimpinan sebelumnya, Soedharmono pun terpilih atas preferensi dan kepentingan politik Soeharto semata.²⁹ Dalam memimpin Golkar, Soedharmono berupaya mengurangi ketergantungan pada tentara, dengan komposisi kepengurusan yang sangat minim unsur tentaranya. Justru banyak tokoh dan pengusaha muda yang terwakili dalam DPP Golkar,³⁰ terutama mereka yang selama ini memperoleh keuntungan dengan kebijakan ekonomi Setneg.³¹

Namun memasuki 1980-an ini pula Soeharto menghadapi masalah baru yang nantinya berimplikasi luas baik secara ekonomis maupun politis, yakni mulai merosotnya harga minyak bumi. Akibatnya pendapatan kotor negara dari sektor minyak dan gas pun mengalami kemerosotan drastis,³² yang akhirnya mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan, terutama pertumbuhan ekonomi.³³ Hal ini memaksa Soeharto mengubah kinerjanya secara umum dengan tak lagi menjalankan kebijakan-kebijakan sinterklas.

²⁸ Lihat Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer. Studi tentang Budaya Politik*, LP3ES, Jakarta, 1992.

²⁹ Walaupun sejak awal Orde Baru Golkar telah menjadi instrumen kekuasaan dan berada di bawah kontrol efektif Soeharto, baru dalam Munas 1983 inilah secara formal hal tersebut dirumuskan. Hal ini tercermin dari dilakukannya beberapa perubahan pada Anggaran Rumah Tangga, yang menempatkan Dewan Pembina, yang diketuai oleh Soeharto, pada posisi yang luar biasa kuat, misalnya berhak mengubah kebijakan-kebijakan DPP, membekukan DPP, serta berhak menentukan komposisi personel dari Dewan Pertimbangan Daerah maupun Dewan Penasehat Daerah. Lihat Suryadinata, *Ibid*.

³⁰ Lihat Suryadinata, *Op. Cit*.

³¹ Lihat Pangaribuan, *Op. Cit*

³² Angka kemerosotan tersebut adalah dari US\$ 19 milyar pada tahun 1981-82 menjadi US\$ 14,7 milyar pada tahun 1982-83, merosot lagi menjadi US\$ 12,4 milyar pada tahun 1985-86, dan semakin merosot US\$ 6,9 milyar pada 1986-87. Lihat Andrew MacIntyre, *Business and Politics in Indonesia*, Asian Studies Association of Australia dan Allen&Unwin, Australia, 1991, hal 56.

³³ Sejak 1976 - 1981 Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, 7 % per tahun, terhitung dari PDB. Saat anjloknya harga minyak bumi, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis; 2 % (1982); 4,2 % (1983); 6 % (1984); 1,9 % (1985) dan 2 % (1986). Lihat Sudarmanto, *Analisis Dampak Kebijakan Deregulasi Industri dan Investasi di Indonesia. Suatu Studi tentang Dampak dari Kebijakan Deregulasi Industri dan Investasi terhadap Kinerja dan Struktur Industri Manufaktur di Indonesia pada Periode 1984 - 1995*, Skripsi Jur.Adm. Negara FISIPOL UGM, tidak diterbitkan, Yogyakarta, 1997, hal 9.

Masyarakat ditarik ke dalam proses pengelolaan negara, terutama bidang ekonomi dengan diluncurkannya deregulasi, debirokratisasi dan privatisasi di berbagai sektor.³⁴

Akhirnya krisis minyak dan segala perubahan kebijakan ini berpengaruh pada dukungan terhadap Soeharto, terutama dari militer. Krisis anggaran tahun 1980-an ini memaksa pemerintah untuk memperhatikan sektor non minyak dan mempertimbangkan penghapusan sistem monopoli, proteksi dan subsidi yang mendukung sistem Industri Substitusi Impor³⁵ yang selama ini dinikmati oleh perusahaan negara yang kebanyakan dikelola para tokoh militer.³⁶ Selanjutnya terlihat adanya tarik menarik antara keinginan untuk menyesuaikan dengan keadaan ekonomi sebagai sesuatu yang tak dapat dielakkan dan akibatnya kebijakan lama ditinggalkan, dengan mereka yang terlanjur menikmati sistem ekonomi yang diterapkan selama ini. Sebagian perusahaan negara penting yang telah dijarah uangnya oleh pribadi-pribadi pengelolanya dan kelompok-kelompok birokrasi dan militer terkait, semakin dituntut pertanggungjawaban kinerjanya.³⁷

³⁴ Kebijakan ini dimaksudkan mengajak dan mempermudah masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam perekonomian negara, dengan melakukan investasi di berbagai bidang. Lihat Mari Pangestu, *Economic Reform, Deregulation and Privatization. The Indonesian Experience*, CSIS, Jakarta, 1996, hal 102 - 103.

³⁵ Lihat Richard Robison, 'Pengembangan Industri dan Ekonomi-Politik Pengembangan Modal Indonesia'. Dalam Ruth T. McVey (ed), *Kaum Kapitalis Asia Tenggara: Patronase Negara dan Rاپuhnya Struktur Perusahaan*, terj. A. Setiawan Abadi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.

³⁶ Lihat Robison, 'Toward A Class Analysis ...

³⁷ Misalnya Pertamina yang pada 1986 harus menyerahkan laporan keuangannya untuk pertama kalinya, dan akhirnya harus menyerahkan pengelolaannya kepada para teknokrat. Lihat Robison, 'Ibid' Pertamina sejak awal Orde Baru selalu dipimpin oleh militer dan menjadi sumber keuangan tentara karena minimnya anggaran pemerintah untuk pertahanan. Pada 1970-an ketika harga minyak melonjak Pertamina banyak menyumbang negara untuk membiayai berbagai proyek, di samping tetap merupakan pencetak uang bagi tentara. Pada saat itu, lembaga ini sangat otonom secara finansial, bahkan Menteri Keuangan Ali Wardhana pun tidak memiliki akses memeriksa laporan keuangannya. Sampai ketika terjadi *collaps* pada pertengahan 1970an, tak satupun pejabat pentingnya dapat diseret ke pengadilan. Lihat Crouch, *Militer dan ..*

Namun penerapan berbagai kebijakan di atas ternyata sangat diskriminatif. Mereka yang dekat dengan istana cenderung tetap 'aman', dan tetap menikmati berbagai keistimewaan.³⁸ Dalam cakupan lebih luas, kebijakan ekonomi ini juga mengakibatkan tergusurnya unit-unit bisnis tentara yang selama ini memberikan pemasukan bagi mereka yang akhirnya jatuh di tangan para pengusaha yang dekat dengan istana.³⁹

Berbagai problematika di atas akhirnya mewajah pada politik Indonesia 1980-an. Awalnya politik keseimbangan memang berjalan: Reaksi negatif pertama datang dari berbagai departemen yang kurang senang dengan intervensi Setneg dalam kapasitasnya sebagai Tim Keppres 10.⁴⁰ Pelaku ekonomi di dalam maupun luar negeri dan berbagai lembaga keuangan dunia menilai negatif kinerja ekonomi Indonesia yang amat dipengaruhi oleh Tim Keppres 10. Kritik-kritik terutama berkenaan dengan iklim bisnis yang tidak sehat, kecenderungan diskriminasi (bahkan dalam konteks sesama pribumi), sampai dengan korupsi dan kolusi di kalangan pemerintahan maupun pengusaha.⁴¹

Namun yang paling berimplikasi politis adalah reaksi negatif dari militer. Apabila reaksi negatif berbagai pihak di atas lebih didasarkan pada alasan-alasan ekonomi, reaksi militer ini lebih kompleks, karena juga menyangkut masalah politik, maupun 'masalah internal' maupun 'klaim historis' tentara. Selain karena

³⁸ Misalnya saja, walaupun telah terjadi upaya pengaturan Pertamina, distribusi minyak tetap berada di tangan tujuh perusahaan yang ditunjuk, dan dua diantaranya —PT Mindo Citra Upaya Duta dan PT Samudra Pertindo— milik anggota keluarga Presiden Soeharto adalah pengontrol bagian terbesar minyak Pertamina. Lihat Robison, 'Toward A Class Analysis'

³⁹ Lihat Richard Robison, 'Indonesia: Tension in State and Regime'. Dalam Richard Robison, et. al. (eds), *Southeast Asia in The 1990s: Authoritarianism, Democracy and Capitalism*, Allen&Unwin, Sydney, 1993.

⁴⁰ Selain karena mengintervensi anggaran belanjanya, dalam pengadaan barang seringkali diberikan yang berkualitas rendah akibat kolusi dan 'pengutamaan produk dalam negeri'. Lihat Winters, *Op. Cit.* Selain itu juga karena telah terpotongnya kemungkinan timbulnya patronase para pejabat tersebut dengan para pengusaha, yang tentunya akan memberikan keuntungan material tersendiri.

⁴¹ Lihat Winters, *Ibid.*

Setneg dipandang telah memasuki urusan internal militer dalam artian klasik,⁴² tentara juga dirugikan dengan kebijakan ekonomi yang mengakibatkan terlepasnya lahan-lahan bisnis mereka, serta kebijakan 'detentaraisasi' Golkar.⁴³ Penentangan tentara terhadap Soedharmono terlihat dengan tidak antusiasnya mereka mendukung Golkar dalam pemilu 1987.⁴⁴ Dalam pemilu 1987 tersebut, melalui jaringan teritorialnya tentara diam-diam mendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dengan mengorganisasi *rally* besar-besaran pada kampanye putaran terakhir di Jakarta, yang akhirnya menghasilkan perolehan suara yang spektakuler di Jakarta.⁴⁵

Dari sisi kepemimpinan militer, selain berhasil mengukuhkan kepemimpinannya, setelah sekian lama menjadi 'jenderal istana', Moerdani juga mengubah penampilannya menjadi 'jenderal Hankam' yang membela kepentingan korps militer dari intervensi istana.⁴⁶ Bahkan kompleks permasalahan dan kebijakan ekonomi dan politik Soeharto sejak awal 1980-an, mendorong Moerdani untuk tak sekedar terjebak dalam rivalitas antar pembantu Presiden, namun juga melakukan perlawanan politik terhadap Presiden. Moerdani pernah menyatakan ketidaksenangannya secara terbuka terhadap aktivitas

⁴² Terutama setelah kewenangan Tim Keppres 10 diperluas dengan sebuah keppres 1985, yang memberikan kewenangan mengontrol pembelian segala keperluan ABRI dan Hankam. Pihak tentara tak dapat berbuat banyak, karena telah menjadi keputusan Soeharto. Pengadaan barang secara rahasia untuk keperluan ABRI dan Hankam, sebelumnya diteliti oleh sebuah tim teknis, kemudian diurus oleh Ginandjar Kartasasmita, lalu Soedharmono sebagai Ketua Tim Keppres 10. Lihat Winters, *Ibid.*, Pangaribuan, *Op. Cit.*

⁴³ Ketidaksenangan tentara atas tokoh sipil terungkap dengan pernyataan Moerdani pada 1993, "...Golkar itu merasa diluncurkan oleh, demi, dari dan dengan Golkar sendiri. Padahal dulu orang-orang Golkar tentara semua....Tak mungkin Golkar-Golkar muda yang terlalu genit itu merasa berdiri sendiri. Siapapun di negeri ini ingin merangkul ABRI..." Lihat 'Kalau Bisa, Tak Masuk Politik', *TEMPO* 1 Mei 1993.

⁴⁴ Soedharmono mengakui adanya masalah dengan perwira teritorial di suatu daerah yang kurang mendukung kirab salah sebuah ormas kepemudaannya menjelang pemilu 1987. Lihat Sudharmono, *Op. Cit.*

⁴⁵ Lihat Vatikiotis, *Op. Cit.* Namun resistensi tentara ini tak begitu berarti, karena ternyata Golkar tetap dapat memenangkan pemilu dan berhasil meraih perolehan suara tertinggi sejak Orde Baru, 73 %.

⁴⁶ Sikap ini pernah ditampilkan oleh Soemitro dalam menghadapi kelompok Ali Moertopo di awal 1970-an. Lihat Crouch, *Militer dan Politik..*

bisnis anak-anak Soeharto di media massa terbitan Australia.⁴⁷ Bahkan sempat ada pembangkangan 'struktural organisatoris' tentara pada 1987, ketika timbul gagasan 'mengoreksi' sumpah prajurit, untuk memastikan kesetiaan terhadap bendera negara dan konstitusi, bukan kepada kepala negara.⁴⁸

Soeharto rupanya melihat bahaya yang mengancam kedudukan politiknya dari tentara. Ia pun segera melakukan antisipasi drastis dengan memberhentikan mendadak Moerdani dan digantikan Try Sutrisno.⁴⁹ Penggantian yang sangat tidak lazim, mendadak serta hanya tiga hari menjelang SU MPR 1988 tersebut makin memperkuat dugaan telah terjadinya kerenggangan hubungan antara Markas Besar dengan Istana.⁵⁰ Moerdani tampak sangat terkejut, ia berharap tidak adanya perubahan dalam angkatan bersenjata sebelum pemilihan Presiden berlangsung.⁵¹

Namun bagi Soeharto situasi masih jauh dari aman. Moerdani boleh dikatakan *down but not out*. Kendatipun dalam kabinet baru Soeharto ia menjabat Menteri Pertahanan yang kurang *significant* secara politis, pengaruh pribadinya di jajaran para perwira aktif masih besar, terutama kepada yang pernah lama menjadi pembantunya yang saat itu sedang mencapai puncak kariernya, serta menempati posisi kunci. Sementara itu Try bukanlah sosok yang kuat dan berpengaruh. Sebagai seorang yang bukan lulusan AMN, ia kurang

⁴⁷ Dikemukakan oleh Prof. Herbert Feith dalam diskusi pribadi dengan penulis, pada pertengahan Desember 1999. Kabarnya, Moerdani juga pernah kesal pada Soeharto yang memintanya menalangi kekalahan salah seorang anaknya di meja judi di luar negeri, dengan diambilkan dari pos anggaran militer. Tentara memang kurang suka bisnis kerabat Soeharto, yang seringkali menyerobot lahan bisnis yang dikelola perusahaan-perusahaan tentara. Lihat Robison, 'Indonesia: Tension in

⁴⁸ Lihat Vatikiotis, *Op. Cit.*

⁴⁹ Lihat 'Sebuah Pergantian Menjelang Sidang', *TEMPO* 20 Februari 1988. Try Sutrisno adalah mantan Pangdam Jaya dan mantan ajudan Presiden

⁵⁰ Jabatan Panglima Angkatan Bersenjata diserahkan dari Jenderal Moerdani kepada Jenderal Try Sutrisno pada 27 Februari 1988, hanya 3 hari menjelang SU MPR yang dimulai pada tanggal 1 Maret 1988. Lihat Anderson, Ben., 'Current Data', *INDONESIA* # 48 edisi April 1989

⁵¹ Lihat Vatikiotis, *Op. Cit.*

memiliki *old-boy network*. Sangatlah jelas bahwa pengangkatannya sebagai Pangab adalah karena preferensi politik Soeharto semata.⁵² Lemahnya Try terlihat dari tindakannya tak melakukan perubahan personalia yang diangkat Moerdani sampai 18 bulan setelah pengangkatannya sebagai Pangab.⁵³

Akhirnya politik keseimbangan tidak sepenuhnya berjalan seperti diharapkan. Di antara para pembantunya memang terjadi konflik, namun posisi Soeharto kini tidak lagi 'di atas konflik'. Langkah politiknya sejak awal 1980-an telah menempatkan dirinya sasaran konflik baru, dan yang berbahaya adalah bahwa hal ini dilakukan tentara. Intervensi istana dan kepemimpinan Moerdani, telah menumbuhkan kesadaran atas 'kepentingan internal tentara' dalam konteks Orde Baru. Perlawanan pun terjadi manakala tentara merasa kepentingan diintervensi oleh pihak lain, termasuk istana.⁵⁴

Resistensi-Resistensi Terbuka

Pasca kejatuhan Moerdani, resistensi politik tentara semakin terbuka dan masif, karena melibatkan momen-momen politik penting,

⁵² Lihat Anderson, Ben., 'Current Data', *INDONESIA* # 48 edisi Oktober 1989. Try adalah produk Akademi Teknik Angkatan Darat yang mendidik para perwira zeni. Ini berarti Try bukan berasal dari korps-korps 'elit' AD; infanteri, kavaleri dan artileri, sebagaimana para perwira senior. Ia juga memiliki pengalaman sangat minim dan bukan termasuk klasifikasi perwira 'garis keras' dalam operasi di Timor-timur, serta tidak berlatar belakang intelijen dan RPKAD, sebagaimana kebanyakan perwira di sekeliling Moerdani.

⁵³ Lihat Anderson, Ben., 'Current Data', *INDONESIA* # 48 April 1989. Indikasi lemahnya posisi Try sebenarnya juga telah terlihat ketika ia masih menjabat sebagai KSAD; dari seluruh stafnya tak satupun yang merupakan orang pilihannya. Lihat Anderson, 'Current Data', *INDONESIA* # 45, April 1988.

⁵⁴ Ada tiga hal yang menyebabkan ketegangan antara istana dan Soedharmono, *versus* tentara; *Pertama*, terancamnya sumber pendapatan tentara oleh rival-rival barunya yang disebabkan oleh perilaku bisnis kerabat dan kroni Presiden yang amat diuntungkan oleh kebijakan ekonomi pemerintah dan Soedharmono, dengan menyerobot lahan-lahan bisnis yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan-perusahaan tentara. *Kedua*, merosotnya *backing* politik militer bagi Soeharto karena sejak awal 1980-an semua kekuatan penentang potensialnya telah tersapu bersih: Soeharto merasa tak terlalu perlu lagi memperhatikan pandangan politik militer. *Ketiga*, Soeharto ingin meningkatkan legitimasi dirinya sebagai Presiden, dan berusaha mematikan anggapan bahwa kekuasaannya tergantung tentara. Lihat Adam Schwarz, *A Nation in Waiting. Indonesia in The 1990s*, Allen&Unwin, Sydney, 1994; Robison, 'Indonesia: Tension...

lembaga-lembaga politik formal, maupun khalayak ramai. Namun perlawanan hanya berupa penentangan terhadap keinginan-keinginan politik Soeharto yang tidak merepresentasikan kepentingan tentara. Selain itu perlawanan ini juga diramaikan oleh kalangan Golkar —melalui pernyataan dan aktivitas para elitnya dan para anggota FKP di parlemen— yang kepemimpinannya berhasil dimenangkan oleh tentara dalam Munas 1988.

Sidang Umum MPR 1988

Walaupun mulai disorot publik serta terdapat tanda-tanda ketidaksenangan tentara terhadap sepak terjang bisnis keluarga dan kroni Soeharto dan langkah politik yang ditempuh, secara politis ia masih kuat di akhir 1980-an.⁵⁵ Namun keinginannya memilih seorang Wakil Presiden (Wapres) menurut preferensinya tidaklah semudah masa sebelumnya. Muncul tentangan dari militer ketika ia ingin Soedharmono menjadi wapres periode 1988-1993. Golkar memang segera 'mengumumkan' Ketua DPP-nya tersebut sebagai calon wapres sehari setelah Soeharto mengisyaratkan kriteria calon wapres mendatang.⁵⁶ Berbeda dengan Golkar, ABRI masih belum bersikap,⁵⁷ walaupun akhirnya menyatakan dukungannya.⁵⁸ Meski demikian cukup terlihat bahwa ada yang salah, meski ditutupi dengan alasan-

⁵⁵ Dukungan terhadap Soeharto tercermin dari mengalirnya pernyataan agar ia 'bersedia' dicalonkan kembali (telah ada 445 pernyataan kebulatan tekad) Lihat 'Sidang dengan Catatan Kaki', *TEMPO* 5 Maret 1988. Di samping penguasaan penuh atas sumber-sumber kekuasaan politik dan ekonomi serta pemitosan atas dirinya akibat manajemen politiknya selama ini, keberhasilan pemerintahannya mengatasi krisis ekonomi akibat merosotnya harga minyak juga merupakan legitimasi baru baginya untuk melanggengkan kekuasaannya.

⁵⁶ Kriteria wapres yang diajukan Soeharto: sikap mental serta ideologi Pancasila dan UUD 1945, cakap atau kapabel, dapat diterima semua pihak, menunjukkan adanya dukungan dari kekuatan politik terbesar, serta berprestasi nyata. Lihat 'Sidang dengan Catatan Kaki', Majalah Berita *TEMPO* edisi 5 Maret 1988.

⁵⁷ Tercermin Saeful Sulun, "ABRI tidak seperti parpol, apa kata komandan kita menurut saja.. pilihan komandan itu baik.", anggota F-ABRI lainnya mengatakan calon dari ABRI akan disampaikan di pandangan umum. Lihat 'Ibid'.

⁵⁸ Lihat, 'Golkar setelah Di Sapih ABRI', *TEMPO* 19 Maret 1988.

alasan prosedural, misalnya "...baru diungkapkan di pemandangan umum..."⁵⁹ dan sebagainya.

Puncak dari 'sesuatu yang salah' ini meledak dengan sebuah fenomena sangat langka dalam wacana politik Orde Baru pada penghujung SU MPR 1988, ketika Ibrahim Saleh dari F-ABRI melakukan interupsi saat Ketua MPR Kharis Suhud membacakan keputusan tentang penetapan Soedharmono sebagai Wapres.⁶⁰ Akhirnya F-ABRI mengklarifikasi bahwa interupsi itu "...tidak mencerminkan pendapat resmi fraksi...."⁶¹ dan dilakukan tanpa konsultasi dengan fraksi.⁶²

Fenomena lain adalah kasus calon wapres alternatif, ketika PPP mengajukan H. Jaelani Naro. Hal ini pertama terjadi dalam SU MPR Orde Baru yang biasanya hanya memunculkan satu calon wapres yang dikehendaki Soeharto. Naro tetap bertahan, meski banyak pihak yang 'menghimbau' mengurungkan niat.⁶³ Soeharto sendiri tak setuju dengan pencalonan Naro dengan menyatakan penolakannya.⁶⁴ Akhirnya PPP menyerah dengan menarik pencalonan Naro.⁶⁵

Pencalonan Naro tersebut tampaknya didukung diam-diam oleh tentara.⁶⁶ Boleh jadi tentara tidak berkeinginan Naro benar-benar jadi. Bukan saja karena tidak dikehendaki Soeharto, latar belakangnya

⁵⁹ Lihat 'Sidang dengan Catatan Kaki', *TEMPO* 5 Maret 1988.

⁶⁰ Lihat 'Soal Intrupsi Itu', *TEMPO* 19 Maret 1988.

⁶¹ Julius Pour, Benny Moerdani. *Profil Prajurit Negarawan*, Yayasan Keuangan Panglima Besar Sudirman, Jakarta, 1993.

⁶² Lihat 'Ibid'

⁶³ Lihat 'Seorang Jago Bernama Naro', *TEMPO* 12 Maret 1988.

⁶⁴ Dikatakannya bahwa calon wapres yang tahu tak dapat suara terbanyak lebih baik mengundurkan diri. Lihat 'Setelah Baiat di Ruang Solo', *TEMPO* 19 Maret 1988. Dalam biografinya ia mengatakan bahwa kalau harus memilih "...saya sudah lama mengenal Sudharmono, lebih mengenal Sudharmono dari pada Naro..." Lihat Dwipayana, G. dan K.H., Ramadhan., *Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*, PT Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, 1989.

⁶⁵ Naro sendiri menolak dikatakan 'mundur', ia menggambarkan dirinya mirip dengan petinju yang ditarik oleh promotornya. Lihat, 'Insya Allah Lima Tahun Penuh', *TEMPO* 19 Maret 1988.

⁶⁶ Lihat Anderson, Ben., 'Current Data', *INDONESIA* # 45 April 1988. Dalam sebuah wawancara, Ibrahim mengatakan "...Kita (F-ABRI) pun nggak kepok (tepuk tangan). ..." saat diumumkan Naro mundur dari pencalonan. Lihat Pour, Op. Cit.

juga kurang *acceptable*. Dukungan tersebut lebih merupakan ekspresi dari ketidaksetujuan terhadap Soedharmono karena berbagai hal yang telah didiskusikan di depan.

Kejadian-kejadian dalam SU MPR tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah perlawanan politik terhadap kekuasaan politik Soeharto dari dalam rejim sendiri, tentara. Kini tak semua kehendak politik Soeharto akan diterima dengan 'keikhlasan' oleh kalangan elit. Interupsi anggota F-ABRI tersebut tidak terlepas dari kompleks opini yang berkembang di dalam fraksinya, walau akhirnya dianulir.⁶⁷

Hasil SU MPR di atas dapat dikatakan sebagai rontoknya faksi tentara, meski Moerdani sendiri masih dipercaya sebagai Menhankam dalam kabinet baru Soeharto. Namun kewenangannya hanya administratif, dan secara politis prestisya jauh dibandingkan jabatannya sebelumnya. Hal ini mungkin bagian dari strategi Soeharto yang menyadari bahwa Moerdani masih berpengaruh besar di jajaran perwira aktif. Dengan pengangkatan itu, ia masih berpeluang mengendalikannya.

Namun tentara tak dapat diam terus. Mereka melakukan konsolidasi internal untuk memulihkan kekuatan politiknya, terutama menghadapi Munas Golkar Oktober 1988. Setelah kalah dalam wakil presiden, mereka tak mau kalah dalam perebutan Ketua Golkar dan tak membiarkan kembali jatuh ke Soedharmono yang masih menginginkannya.⁶⁸ Hal ini sekaligus dijadikan ajang *test case*, untuk melihatkan kekuatan politiknya dalam menghadapi lawan-lawan politiknya, termasuk presiden.

⁶⁷ Dalam sebuah kesempatan Ibrahim mengatakan, "Sebenarnya saya dipengaruhi oleh suasana teman-teman di F-ABRI itu. Bukan saya sendiri yang nggak *kepok* (tepuk tangan), seluruh anggota fraksi (mungkin saat Soedharmono dicalonkan secara resmi oleh pimpinan sidang)...." Lihat Pour, *Op. Cit.*

⁶⁸ Dengan melihat prestasinya, wajarlah jika ia berharap dapat terpilih lagi, yang tercermin dari ungkapannya "Tak ada peraturan yang melarang seorang Wakil Presiden sebagai Ketua Umum Golkar." Lihat 'Golkar. Garis Tangan Siapa yang Cocok', *TEMPO* 17 September 1988. Apalagi pendahulunya, Amir Moertono, juga memimpin Golkar dua kali. Lihat Suryadinata, *Op. Cit.*

Isyu Komunis dan Munas Golkar 1988

Gerilya politik menjegal Soedharmono yang ingin kembali menjadi Ketua Golkar telah dimulai beberapa saat setelah SU MPR 1988 dengan menembakkan isu komunis. Beberapa pengamat politik melihat besarnya peranan tentara di sekitar Moerdani di dalamnya.⁶⁹ Dugaan para pengamat tersebut didasarkan adanya peranan para pejabat militer, ataupun bekas pejabat militer dalam menghembuskan isu tersebut. Kampanye ini diawali dengan berita tentang keterlibatan beberapa fungsionaris di daerah yang terindikasi sebagai bekas PKI oleh para pejabat militer lokal.⁷⁰ Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan tersebut, Soedharmono adalah pihak yang sangat terpukul: bahwa langkahnya memperbesar politisi sipil dan mengurangi tentara di Golkar adalah 'salah' sehingga tersusupi komunis, dan kemenangan 73% ternyata karena dukungan komunis.

Setelah melanda para aktivis Golkar di daerah, isyu penyusupan komunis di pemerintahan pun mengemuka. Makin ramai setelah Sarwo Edhie menyatakan bahwa ada bekas Pesindo yang memegang jabatan penting di pemerintahan. Tak jelas siapa yang dimaksudkan, karena Sarwo tak melakukan klarifikasi.⁷¹ Namun

⁶⁹ Misalnya E. Aspinall, 'Student and The Military: Regime Friction and Civilian Dissent in The Late Soeharto Period', *INDONESIA* # 59 April 1995. Vatikiotis, *Op.Cit.*; Crouch, *Op. Cit.*; Schwartz, *Op. Cit.*

⁷⁰ Diawali dengan kasus seorang Ketua DPD Golkar dan Ketua FKP DPRD Payakumbuh Sumatera Barat, S. Datuk Alamsyah, yang dipecat dari kedudukannya serta harus berurusan dengan aparat hukum setempat karena dianggap berindikasi sebagai bekas anggota PKI. Menurut komandan Korem setempat, yang bersangkutan dianggap berusaha membentuk 'Dewan Revolusi Daerah' setelah percobaan kudeta 1 Oktober 1965. Lihat 'Akhir Perjalanan Sang Datuk', *TEMPO* 02 April 1988. Tak lama berselang, tokoh daerah Golkar yang lain, bekas bendahara Golkar Sumatera Selatan Ahmad S. Carepeboka juga dituduh sebagai bekas anggota PKI golongan B.2. Lihat 'Setelah Palu Diketukkan', *TEMPO* 29 Oktober 1988.

⁷¹ Lihat 'Saya Tidak Bilang Begitu, Kata Sarwo Edhi', *TEMPO* 7 Mei 1988. Sarwo Edhie adalah tokoh pendiri Orde Baru dan pengkritik Soeharto. Ia juga salah seorang yang tidak setuju pencalonan Soedharmono, bahkan ia mengundurkan diri dari DPR sebagai protes. Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) adalah sayap militer Partai Sosialis pimpinan Amir Syarifuddin yang terlibat dalam peristiwa Madiun 1948.

Soedharmono tak urung merasa digunjingkan dan membantahnya.⁷² Alamsyah juga berkomentar bahwa ada bekas PKI, anak-anak PKI di DPP Golkar.⁷³

Selain bermain dengan isu, tentara juga bermain pada tataran lembaga dalam merebut kepemimpinan Golkar, di antaranya dengan menguasai kepemimpinan Golkar di daerah (DPD maupun DPC), karena mereka lah yang nantinya memiliki suara di Munas, termasuk dalam pemilihan Ketua Golkar. Peluang menguasai daerah ini semakin lebar dengan kebijakan penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) sebelum Musyawarah Nasional (Munas).⁷⁴ Kebijakan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh tentara sehingga banyak bekas tentara yang terpilih menduduki kursi kepengurusan, bahkan ada yang masih aktif.⁷⁵ Melalui cara ini, akhirnya 120 perwira terpilih sebagai pimpinan Golkar di daerah.⁷⁶ Hal ini semakin menguatkan dugaan akan adanya skenario tertentu dari pihak tentara untuk menguasai Golkar dari bawah.⁷⁷

⁷² Lihat 'Pak Dhar Menjawab', *TEMPO* 29 Oktober 1988. Sanggahan ini diperkuat oleh pernyataan beberapa teman pada saat bergerilya. Lihat 'Setelah Palu Diketukkan', *TEMPO* 29 Oktober 1988.

⁷³ Lihat 'Tuduhan PKI. Mereka Tak Seperti Kerbau', *TEMPO* 16 Juli 1988. Perlu juga diketahui bahwa di awal 1970-an, pernah terjadi revalitas antara Alamsyah dan Soedharmono memperebutkan pengaruh Soeharto. Ketika itu Alamsyah telah menjabat sebagai Sekretaris Negara sejak 1968 ketika SPRI (Staf Pribadi Presiden) dibubarkan, sedangkan Soedharmono sebagai Sekretaris Kabinet sejak 1966. Sejak saat itu Alamsyah tak pernah lagi memegang jabatan politik penting. Ia kemudian dijadikan Duta Besar untuk Belanda antara tahun 1972 - 1974, diangkat sebagai anggota DPA antara tahun 1974 - 1978, dan menjadi Menteri Agama antara tahun 1978 - 1983. Lihat Pangaribuan, *Op. Cit.*

⁷⁴ Lihat 'Untuk Menjaring Aspirasi Bawah', *TEMPO* 25 Juni 1988.

⁷⁵ Memang ada kebijakan DPP Golkar bahwa tentara aktif diijinkan menduduki kepengurusan, namun harus mengundurkan diri dari dinas ketentaraan dan melepas segala jabatan struktural yang disandang. Namun fenomena banyaknya kepengurusan Golkar di daerah yang jatuh ke tentara, memang sesuatu yang telah dirancang sebelumnya. Dalam prakteknya, sebelum Musda digelar, calon pengurus harus sudah meninggalkan dinas aktifnya di ABRI. Lihat 'Mereka Bukan Orang Lain', *TEMPO* 6 Agustus 1988.

⁷⁶ Lihat Vatikiotis, *Op. Cit.*

⁷⁷ Misalnya kasus Basofi Sudirman yang berhasil menjadi Ketua DPD Golkar Jakarta. Lihat 'Ia Sudah Lama Dipersiapkan', *TEMPO* 10 September 1988. Basofi Sudirman mengakui bahwa keberadaannya sebagai Ketua DPD Golkar DKI Jakarta adalah karena perintah Pangab Moerdani; karena Moerdani telah melepas jabatannya sejak akhir Februari 1988, tak jelas apakah 'perintah Pangab' tersebut dikeluarkan sebelum Moerdani

Ketika upaya menghancurkan Soedharmono tengah digalakkan, Soeharto masih belum menentukan pilihannya sampai sebulan sebelum Munas.⁷⁸ Sebenarnya siapapun yang ia kehendaki pasti akan menjadi Ketua Golkar, setelah dalam Munas 1983 dikukuhkan posisi dan kewenangan yang sangat besar pada Dewan Pembina dalam menentukan arah Golkar.⁷⁹

Demi melihat situasi politik saat itu terutama dengan sikap tentara terhadap kepemimpinan Golkar mendatang, Soeharto akhirnya memilih seorang tokoh yang dapat diterima tentara, Wahono.⁸⁰ Keputusan tersebut diumumkan beberapa hari menjelang Munas,⁸¹ dan semua pihak pun beramai-ramai mendukungnya. Ketika Munas makin dekat, Wahono semakin santer disebut sebagai calon pengganti Soedharmono.⁸²

Sementara Soedharmono pun akhirnya mengendur sejak beberapa saat menjelang Munas.⁸³ Sikap Soedharmono semakin jelas dalam pidato pembukaan Munas, ia menyatakan bahwa ia "...tidak mempersiapkan diri untuk menjadi Ketua Umum Golkar.", karena

disingkirkan. Kalau sebelumnya berarti telah ada rencana tentara menguasai kembali Golkar sejak jaman Moerdani. Kalau setelahnya, hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Moerdani di tentara. Lihat, 'Basofi Sudirman: "Saya Tidak Dianaktirikan ABRI"', *FORUM KEADILAN* 27 Mei 1993. Besar kemungkinan kasus seperti ini juga terjadi di daerah-daerah lain.

⁷⁸ Menurut Sumber TEMPO di DPP Golkar, Ketua Dewan Pembina (Soeharto) masih belum menyusun kriteria buat jabatan Ketua Umum Golkar sampai dengan pertengahan September 1988. Lihat 'Golkar: Garis Tangan Siapa yang Cocok', *TEMPO* 17 September 1988.

⁷⁹ Lihat Suryadinata, *Op. Cit.*

⁸⁰ Wahono adalah purnawirawan perwira tinggi AD yang pernah menjadi asisten Soeharto saat sebagai Pangkostrad pada pertengahan 1960-an, mantan Pangdam Brawijaya, mantan duta besar, serta baru saja berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Timur dan dilantik sebagai Inspektorat Jenderal Pembangunan. Lihat 'Wahono: Lupakan Popularitas Diri', *Kedaulatan Rakyat* 26 Okt. 1988.

⁸¹ Lihat 'Martono: Wahono Cocok Menjadi Ketua Umum Golkar', *Kedaulatan Rakyat* 18 Okt. 1988.

⁸² Lihat 'Kursi Ketua, Siapa yang Punya', *TEMPO* 15 Oktober 1988. Waktu itu ada beberapa nama lain yang juga meramalkan bursa Calon Ketua Umum Golkar; Kharis Suhud, Rudini, Azwar Anas, Soesilo Soedarman, Soepardjo Rustam dan sebagainya.

⁸³ Lihat 'Sudharmono Bantah Terlibat PKI Madiun', *Kedaulatan Rakyat* 19 Oktober 1988.

"...akan memusatkan perhatian tugas kenegaraan dan pemerintahan yang diemban sebagai Wakil Presiden"⁸⁴

Pemilihan Ketua Golkar 1988 ini adalah untuk pertama kalinya tentara mempertontonkan kekuatan politiknya kepada Suharto. Terlepas dari kemungkinan penempatan Wahono adalah bagian strategi politik Soeharto, yang patut dicermati adalah kemampuan tentara memaksa Soeharto mengikuti keinginannya. Keberhasilannya memanfaatkan isu komunis untuk merontokkan moril kubu Soedharmono membuktikan kemampuan aparaturnya intelijen dan teritorialnya dalam mempengaruhi opini publik. Keberhasilan mereka menguasai sebagian besar kepemimpinan Golkar di daerah memperlihatkan rapi dan kompaknya jaringan teritorial. Kemampuan-kemampuan di atas sengaja dipertontonkan agar kekuatan politiknya tidak dianggap remeh.

Perlawanan di Parlemen

Kemenangan tentara dalam rivalitas kursi Ketua Golkar telah mengembalikan kepercayaan diri mereka, setelah harus menyerah dalam SU MPR 1988. Inilah yang nantinya dijadikan basis dalam beroposisi terhadap Soeharto. Ini juga yang menandai kegagalan Soeharto mengembalikan politik keseimbangan sejak menjelang SU MPR 1988. Bila sebelumnya Soeharto 'berdiri di atas konflik', kini untuk pertama kalinya ia menjadi sasaran tembak baru sejak berhasil menyingkirkan seluruh penentangannya pada awal 1974. Hal lain yang harus diperhitungkan Soeharto adalah bahwa yang kini beroposisi adalah tentara, termasuk yang masih aktif.

DPR pun kini tak lagi pasif, dan terlihat ingin memperkuat dirinya dalam fungsi pengawasan, serta giat mengkritisi berbagai langkah pemerintah. Forum Dengar Pendapat, tempat para menteri diundang untuk membicarakan sebuah rancangan kebijakan, menjadi ajang perdebatan, dan sering kritikan para anggota dewan muncul.

⁸⁴ Lihat 'Sudharmono Tak Siapkan Diri Untuk Dicalonkan', *Kedaulatan Rakyat* 21 Oktober 1988.

Kini DPR juga aktif menerima kelompok pembangkang maupun pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan pemerintah. Hal yang mengikis 'tembok struktural' yang membatasi wakil rakyat dengan yang diwakili.

Sejak dipimpin Kharis Suhud, DPR telah melakukan berbagai upaya memperkuat diri. Kharis sendiri sering mengemukakan keprihatinan atas mandulnya DPR, serta menyuarakan pentingnya penguatan DPR.⁸⁵ Di bawah kepemimpinannya, DPR mengadakan pembaharuan dalam mengontrol pemerintah, misalnya dengan acara tanya jawab langsung dengan para menteri, menggantikan sistem tertulis sebelumnya.⁸⁶ Melalui pembaharuan tersebut, parlemen sering mengundang kabinet melakukan dengar pendapat sebelum digulirkannya suatu kebijakan, dan tak jarang terjadi perdebatan seru atas sebuah rancangan kebijakan.⁸⁷ DPR juga kian aktif memposisikan dirinya sebagai 'wakil rakyat', dengan membuka pintunya untuk menerima pengaduan langsung atas berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat.⁸⁸

Gebrakan DPR yang mengagetkan adalah keberaniannya menggulirkan isu politik 'tabu' di Orde Baru; keterbukaan dan suksesi kepemimpinan. Kedua isu ini menjadi bahan pembicaraan yang kemudian diikuti dengan merebaknya wacana HAM, lingkungan, pertanahan, maupun kebijakan bermasalah. Sikap ini pada gilirannya mengubah kinerja DPR tidak lagi menjadi *rubber stamp* pemerintah, melainkan sebuah *watch dog* yang kritis dan dapat bersikap keras pada pemerintah. Cukup mengherankan bahwa banyak di antara

⁸⁵ Ia bahkan pernah mengusulkan hal yang kontroversial, dan segera memperoleh reaksi negatif dari pemerintah: agar DPR dilibatkan penyusunan kabinet. Lihat 'Dinamika Kharis', *TEMPO* 23 Februari 1991.

⁸⁶ Lihat Max Lane, 'Suharto Checks 'Openness'', *INSIDE INDONESIA* Oktober 1991.

⁸⁷ Misalnya acara dengar pendapat tentang rencana pemerintah menaikkan tarif listrik yang ditentang DPR. Lihat 'Kenaikan Tarif di Antara Wewenang dan Gugatan', *TEMPO* 8 April 1989.

⁸⁸ Misalnya dengan kegiatan Open House yang digelar DPR yang menerima banyak pengaduan, terutama masalah pertanahan. Lihat 'Open House DPR. Lima Belas untuk Unek-Unek', *TEMPO* 2 Maret 1991.

mereka yang kritis adalah dari F-ABRI maupun FKP, yang selalu diidentikkan sebagai kekuatan pro pemerintah di DPR.⁸⁹

Parlemen membuat 'sejarah' pada tanggal 21 Juni 1989, Komisi II DPR yang dimotori oleh Mayjen Samsuddin dan Kol. (Pol) Roekmini menggelar sebuah acara dengar pendapat di gedung DPR bertema cukup 'berani' dan 'langka', yakni 'keterbukaan' dengan menghadirkan para pembicara yang cukup kritis, antara lain mantan Pangkopkamtib Jend. (Purn.) Soemitro dan seorang pakar politik Dr Alfian.⁹⁰ Dalam acara tersebut, Soemitro melontarkan ide-ide politik 'tabu', antara lain masalah suksesi kepemimpinan nasional, UU kepartaian dan pertanggungjawaban menteri terhadap DPR.⁹¹

Gebrakan Komisi II tersebut ternyata meluas ke segala penjuru. Dalam waktu singkat, 'keterbukaan' dan 'suksesi' menjadi perbincangan publik dan polemik yang sangat hangat, yang bukan saja menempati halaman-halaman utama media, namun juga bergulir dalam forum-forum diskusi maupun seminar.⁹² Selain itu upaya politik yang dirintis Komisi II DPR tersebut juga telah menimbulkan harapan baru bagi masyarakat atas kinerja lembaga legislatif, yang selama ini 'mandul' dalam menjalankan fungsi-fungsi normatifnya.⁹³

⁸⁹ Lihat 'Tukang Stempel yang Mulai Kritis dan Berani', *EDITOR* 15 Juli 1989. Dalam F-ABRI yang sering bersikap kritis antara lain; Kharis Suhud, Harsudiono Hartas, Samsuddin, Roekmini. Saeful Sulun dan sebagainya. Sementara dari F-KP misalnya Marzuki Darusman, Anang Adenansi dan sebagainya.

⁹⁰ Menurut Roekmini acara ini dilatarbelakangi oleh "kemacetan komunikasi politik" karena sensor ketat dari pemerintah terhadap media sehingga pers mirip sebagai "bulletin pemerintah". Ia juga berpendapat bahwa, "...sampai sekarang, keterbukaan politik masih menjadi tuntutan utama" Samsuddin menyatakan bahwa sejak setahun sebelumnya telah terjadi kemacetan politik yang berakibat ketertutupan dan sentralisasi kekuasaan. Lihat 'Keterbukaan: Mari Bicarakan Bersama', *TEMPO* 8 Juli 1989.

⁹¹ Lihat 'Keterbukaan: Mari Bicarakan Bersama', *TEMPO* 8 Juli 1989. Tentang suksesi, diusulkan agar proses pemilihan Presiden di masa yang akan datang dilaksanakan secara terbuka; para calon membawa konsepnya dan beradu argumentasi, dan agar dilakukan melalui *voting*. Sementara itu tentang sistem kepartaian, diusulkan agar praktek *floating mass* segera diakhiri. Lihat 'Suksesi. Kalau Sakit Gigi ke Singapura?' *TEMPO* 1 Juli 1989.

⁹² Awal tahun 1989 Soeharto mengeluarkan biografinya yang menimbulkan interpretasi bahwa dirinya tidak akan menjadi presiden lagi pada tahun 1993. Ia menyatakan bahwa pelantikan sebagai Presiden 1988 adalah yang terakhir. Lihat G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., *Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*, PT Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, 1989.

⁹³ Lihat 'Maka, Sebuah Harapan Baru Pun Lahir', *TEMPO* 15 Juli 1989.

Setelah 'keterbukaan dan suksesi' menjadi bahan polemik dan pembicaraan publik luas, akhirnya pimpinan tentara mengeluarkan pernyataan resmi yang bernada negatif. Try menyatakan untuk "...mempertahankan kepemimpinan nasional Orde Baru.." dan tentara akan "...mempertahankan kelangsungan hidup bangsa.." dengan "...mempertahankan semangat dan tekad Orde Baru..."⁹⁴ Bahwa keterbukaan politik sebenarnya "...telah ada..."⁹⁵ hanya "...punya keterbatasan..."⁹⁶ Ia juga mengeluarkan *statement* negatif mengenai kiprah F-ABRI dengan menyatakan bahwa "...tak semua pendapat anggota F-ABRI di DPR pas dengan kebijakan ABRI..."⁹⁷ Ini menunjukkan bahwa F-ABRI tak mengkonsultasikan langkahnya dengan mabes sebelumnya dan makin memperlihatkan betapa Try telah kehilangan kendali F-ABRI yang dipimpin oleh Hartas.

Soeharto merasa kegerahan dengan polemik tersebut. Ia juga mulai sadar bahwa dirinya mulai menjadi sasaran tembak setelah orang bicara Lembaga Kepresidenan dan bisnis keluarganya. Awalnya ia hanya menyatakan bahwa keterbukaan berpendapat secara demokratis bukannya tanpa kendali dan harus dilihat "...bertentangan atau tidak dengan kepentingan rakyat.... jangan asal njeplak..."⁹⁸ Ia juga menggunakan 'alasan-alasan konstitusional' untuk mengerem isu suksesi pada pertengahan Juni 1989, dengan mengatakan bahwa yang berhak berbicara soal itu adalah MPR hasil pemilu 1992.⁹⁹ Ia serius menanggapi, sehingga merasa perlu menjelaskannya saat melakukan kunjungan ke luar negeri.¹⁰⁰ Namun polemik tetap berjalan sehingga membuat Soeharto kegerahan dan

⁹⁴ Lihat 'Rapat Pimpinan ABRI. Tiada Tantangan Tanpa Jawaban', *TEMPO* 19 Agustus 1989.

⁹⁵ Lihat "'Jangan Asal Njeplak", Kata Presiden', *TEMPO* 29 Juli 1989.

⁹⁶ Lihat 'Keterbukaan. Suara yang Perlu Disetem', *TEMPO* 22 Juli 1989.

⁹⁷ Ia juga membantah sinyalemen politik F-ABRI, misalnya kebebasan pers. Ia membantah bahwa pers hanya menjadi 'bulletin pemerintah'. Lihat 'Keterbukaan. Suara yang Perlu Disetem', *TEMPO* 22 Juli 1989.

⁹⁸ Lihat "'Jangan Asal Njeplak", Kata Presiden', *TEMPO* 29 Juli 1989.

⁹⁹ Lihat 'Suksesi. Soal Suksesi Menurut Pak Harto', *TEMPO* 10 Juni 1989.

¹⁰⁰ Lihat 'Calon Presiden, Siapa yang Punya', *TEMPO* 17 Juni 1989. Penegasan soal ini juga dilakukan dua kali. Hanya saja yang pertama melalui Mesesneg Moerdiono di Jakarta.

mengeluarkan pernyataan keras, "...Setiap saat presiden dapat diganti, asalkan melewati konstitusi. Kalau tidak akan digebuk.....siapa saja., ..dari pimpinan parpol sampai jenderal.."101 Pernyataan tersebut mencerminkan makin meningkatnya suhu politik, terutama antara Soeharto dan Moerdani. Bahkan sempat beredar kabar Soeharto melarang Moerdani keluar negeri.¹⁰²

Perlawanan di Jalanan

Fenomena lain pasca SU MPR 1988 adalah kembalinya gerakan mahasiswa, dengan meledaknya demonstrasi sejak akhir 1988 Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan sebagainya. Terakhir mereka bergerak tahun 1978, ketika memprotes NKK/BKK dan pencalonan kembali Soeharto. Setelah aksi itu dihadapi dengan represif mahasiswa pun tertidur lelap. Berbeda dengan 1978 yang mengangkat isu-isu berskala nasional, isu-isu kali ini umumnya bersifat lokal, seperti penggusuran tanah, ataupun masalah internal kampus, walaupun ada yang mengangkat isu-isu aktual seperti kasus Kedung Ombo.¹⁰³ Secara umum demonstrasi mereka tak menghadapi rintangan dari aparat, walau di antaranya sempat timbul bentrokan.¹⁰⁴

Fenomena menarik yang terlihat dalam demonstrasi mahasiswa ini adalah aparat di lapangan yang menampilkan sikap netral dan 'bersahabat'. Aparat lebih memilih sikap sabar namun waspada.¹⁰⁵

¹⁰¹ Lihat 'Harus Konstitusional, Kata Presiden', *TEMPO* 23 September 1989. Soeharto pernah memberikan atas polemik ini pada Oktober 1986. Dikatakan bahwa dengan mekanisme konstitusional "...tak perlu khawatir akan ada presiden seumur hidup..." Lihat 'Buat Apa Ribut-Ribut', *TEMPO*, 23 Desember 1989.

¹⁰² Lihat Max Lane, 'Challenge to Soeharto. Update on Recent Development', *INSIDE INDONESIA* Okt. 1989.

¹⁰³ Lihat 'Yang Protes & Tergusur', *TEMPO* 1 April 1989.

¹⁰⁴ Lihat 'Ibid'

¹⁰⁵ Try Sutrisno masih mentoleransi demonstrasi mahasiswa, dengan menganggapnya sebagai gejala dinamika masyarakat. Ada juga sikap yang 'mendukung', Soebiyakto (Gubernur Lemhanas) melihat aksi mahasiswa "...pasti bertujuan baik..." Lihat 'Ibid'. Kepala Bakin Soedibjo berkomentar bahwa aksi tersebut merupakan "...bagian dari dinamika kelompok ilmiah yang tanggap terhadap lingkungan..." Lihat 'Demonstrasi Mahasiswa. Mereka Dibidik Pasal 154 KUHP', *TEMPO* 17 Juni 1989.

Sikap lunak aparat terlihat jelas di lapangan dengan membiarkan demonstrasi, sementara mereka hanya berjaga-jaga. Menurut seorang perwira lapangan, dirinya memang diperintah untuk "tidak bertindak keras terhadap mahasiswa", selama tidak melakukan kekerasan atau subversi.¹⁰⁶

Di samping itu, terungkap upaya terbuka tentara mendukung aksi mahasiswa. Pada awal 1989 seorang perwira 'orangnya Moerdani' yang menyamar sebagai wartawan, mengunjungi para aktivis mahasiswa di Jawa Tengah. Ia bertanya seputar gerakan mahasiswa, dan meminta mereka menghubunginya "...jika memerlukan apapun, jika ingin mengkritik Soeharto, jika membutuhkan dana, jika membutuhkan poster atau semacamnya." Ia juga menawarkan hubungan dengan Fraksi ABRI di DPR, dan meninggalkan sejumlah besar uang.¹⁰⁷

Pola 'pendekatan' di atas bukan satu-satu yang terjadi karena juga terjadi di kota lain yang memiliki komunitas mahasiswa cukup besar. Kontak informal antara aktivis mahasiswa dengan para perwira intelijen lokal yang lebih teratur juga terjadi di Jakarta pada akhir 1989. Kebanyakan inisiatifnya dari para perwira yang terkadang disertai ancaman dan intimidasi. Para perwira berusaha mencari informasi tentang aktivitas dan motivasi para mahasiswa yang terkadang berkembang menjadi diskusi tentang hal-hal yang lebih

¹⁰⁶ Tindakan yang 'lebih bersahabat' dilakukan oleh Danrem Yogyakarta, Kolonel Soetoyo N.K., berdialog dengan para mahasiswa bahkan mengundang Shalat Tarawih berjamaah. Di Bogor, Danrem Kol. Maman Herawan, mengajak mahasiswa berdialog di markasnya. Lihat 'Dicari: Protes Mahasiswa yang Tidak Semrawut', *TEMPO* 15 April 1989. Namun aksi-aksi demonstrasi di beberapa tempat masih saja berakhir dengan bentrokan yang diikuti dengan penahanan para demonstran. Lihat 'Update on Student Activities', *INSIDE INDONESIA* Oktober 1989. Keterlibatan militer juga terlihat dalam demonstrasi anti SDBS (yang menghasilkan tujuh sampai sepuluh juta dolar setiap minggu bagi keluarga Soeharto) pada awal 1990-an. Lihat Damien Kingsbury, 'Political Showdown', *INSIDE INDONESIA* Maret 1994. Dalam sebuah aksi anti SDBS di Yogyakarta, aparat menawarkan kendaraan angkutan ke DPRD. Di Jakarta para demonstran sempat 'berhasil' menembus penjagaan aparat di Istana Merdeka untuk pertama kalinya sejak tahun 1974. Lihat 'Tinggal Menunggu Kata Akhir', *TEMPO* 20 November 1993. Soeharto yang sedang mengadakan perjalanan ke luar negeri tak mengambil tindakan apapun, dapat dipastikan dia tahu bahwa aksi-aksi itu didukung tidak langsung oleh tentara. Lihat Aspinall, 'Op. Cit.'

¹⁰⁷ Lihat Aspinall, 'Ibid.'

umum. Mahasiswa menggunakan kesempatan ini untuk mencari informasi konstelasi politik elit, khususnya tentang 'sempalan Moerdani' dan kekayaan keluarga Soeharto. Dalam hal ini tak jarang tentara mengkritik Presiden dengan terbuka dan mengemukakan konflik antara para menteri atau skandal yang melibatkan para pejabat rezim.¹⁰⁸

Tak mustahil ada *grand design* dari tentara untuk mendompleng gerakan mahasiswa dalam rangka melakukan oposisi terhadap Soeharto.¹⁰⁹ Walaupun belum jelas apa tujuan politiknya, kemungkinan dibayangkan koalisi 'tentara-mahasiswa' seperti saat menumbangkan Soekarno. Kasus demonstrasi mahasiswa ini juga menunjukkan masih kuatnya pengaruh Moerdani di intelijen — terutama Bais. Hal ini juga memperlihatkan bagaimana Try Sutrisno seperti 'kehilangan kendali' terhadap para bawahannya di lapangan, terutama yang berada di lapangan intelijen dan teritorial.

Kontra Oposisi yang Destruktif

Untuk beberapa waktu 'gerakan oposisi' tersebut mampu memaksa Soeharto untuk lebih bersifat defensif. Namun demikian terkadang ia mengemukakan ketidaksenangannya secara terbuka atas kejadian-kejadian politik saat itu, terutama yang berkaitan dengan sepak terjang tentara. Soeharto menyatakan ketidaksenangannya terhadap perilaku beberapa anggota parlemen dari tentara dalam suatu acara Tapos Bogor. Soeharto mengatakan bahwa DPR dibenarkan mengkritik pemerintah, namun harus dalam "...batas wewenangnya...", dan jangan "...asal njeplak..."¹¹⁰ sehingga "...seolah-olah kalau tak berani beda dengan pemerintah, itu belum DPR..."¹¹¹ Ia tidak melarang anggota dewan bersikap vokal, tapi

¹⁰⁸ Lihat Aspinall, 'Ibid.'

¹⁰⁹ Tentara memperlakukan berbeda mahasiswa yang anti Soeharto dan anti militer. Mereka yang anti Soeharto tidak akan dikenakan tindakan keras, atau bahkan 'diinterogasi' dengan cara-cara yang bersahabat, dan sebaliknya terjadi pada demonstran yang anti militer. Lihat Aspinall, 'Op. Cit.'

¹¹⁰ Lihat 'Boleh Vokal, Asal Tidak Njeplak', EDITOR 19 Oktober 1991.

¹¹¹ Lihat 'Pembagian Tugas dari Tapos', TEMPO 5 Oktober 1991.

"...harus tetap memegang teguh Pancasila...."¹¹² serta "...tidak akan mengubah sistem..."¹¹³ Dalam pertemuan yang dua kali disiarkan TVRI tersebut,¹¹⁴ Soeharto memberikan perhatian terhadap F-ABRI di DPR, yang hendaknya "...jangan *katut* (terbawa) dan *tiru-tiru* (ikut-ikutan).." bersikap 'keras' pada pemerintah, "...supaya dianggap betul-betul wakil rakyat..", karena yang menyuarakan rakyat bukan hanya DPR, tapi juga pemerintah.¹¹⁵

Pada saat yang bersamaan Soeharto secara bertahap juga mulai mengkonsolidasikan ulang kekuasaannya. Setidaknya terdapat tiga buah langkah yang saling berkaitan yang ditempuh Suharto dalam hal ini. *Pertama*, pencarian basis dukungan baru (Islam) melalui 'politik akomodasi' dengan berbagai kebijakan yang 'sejalan' dengan aspirasi politik umat Islam sejak akhir 1980-an.¹¹⁶

¹¹² Lihat 'Boleh Vokal, Jangan Ubah Sistem', *TEMPO* 19 Oktober 1991.

¹¹³ Lihat 'Boleh Vokal, Asal Tidak Njeplak', *EDITOR* 19 Oktober 1991.

¹¹⁴ Acara pertemuan antara Soeharto dan para tamunya tersebut memang ditayangkan dua kali oleh TVRI. Alasan resminya adalah karena pada penayangan pertama, banyak bagian yang terpotong karena *editing*. Pada penayangan kedua, pertemuan itu disiarkan sepenuhnya. Menurut sumber *EDITOR*, hal ini karena Soeharto ingin publik tahu apa saja yang dikatakan kepada para pimpinan ABRI. Lihat 'Berita itu Bukan Rahasia', *EDITOR* 19 Oktober 1991. Mungkin ini juga cerminan kekesalan Soeharto terhadap politik elit tentara selama ini, sehingga ia berupaya 'mempermalukan' mereka dengan memarahinya di depan publik.

¹¹⁵ Lihat 'Boleh Vokal, Jangan Ubah Sistem', *TEMPO* 19 Oktober 1991.

¹¹⁶ Menurut Agus Tri Lastomo, politik akomodasi ini diantaranya ditandai dengan: *Pertama*, disahkannya UU Pendidikan Nasional yang mewajibkan pelajaran agama dari SD sampai perguruan tinggi dan kewajiban agar ada kesamaan agama antara guru agama dan murid-muridnya; menjamin lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti MI, Mts dan MA. *Kedua*, pengesahan Undang-undang Peradilan Agama (UUPA), yang berarti diformalkan penggunaan hukum agama (Islam) dalam berbagai permasalahan di masyarakat yang beragama Islam: perkawinan, waris, wasiat, hibah, cerai dan sebagainya. *Ketiga*, didirikannya Bank Islami, Bank Muamalat Indonesia. *Keempat*, adanya keberpihakan pemerintah pada umat Islam dalam kasus-kasus penghinaan Agama Islam melalui media massa (misalnya kasus *Monitor*). *Kelima*, didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang menandai terharubirukannya politik Indonesia dengan 'Islam'. *Keenam*, adanya 'keterwakilan' secara signifikan umat Islam dalam keanggotaan legislatif maupun kabinet Soeharto 1993. Lihat Agus Tri Lastomo, *Politik Akomodasi. Studi tentang Hubungan Umat Islam dengan Pemerintah Orde Baru Pasca 1990 dan Prospek Demokratisasi di Indonesia*, Skripsi pada Jur. Ilmu Pemerintahan FISIPOL Univ. Gadjah Mada, Tidak Diterbitkan, Yogyakarta, 1997. Untuk pendirian ICMI, lihat Robert W. Hefner, *ICMI dan Perjuangan Kelas Menengah Indonesia*, terj. Endi Haryono, Tiara Wacana Yogyakarta, 1995.

Rekonfigurasi elit politik dan elit militer Indonesia pada paruh awal 1990-an juga harus dilihat dalam kerangka ini. *Kedua*, dilakukannya rekonfigurasi elit politik. Hal ini terutama berkaitan dengan para elit politik dari FKP di parlemen yang untuk pertama kalinya Soeharto secara langsung dan terbuka menggunakan wewenang sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar dalam menentukan para calon Golkar dalam keanggotaan DPR/MPR pemilu 1992. Mereka yang dipandang vokal pun disingkirkan, digantikan oleh mereka lebih yang patuh dan yang mencerminkan aspirasi umat Islam.¹¹⁷ Kendati kalah dalam isu wakil presiden pada SU MPR 1993,¹¹⁸ Soeharto berhasil merebut kembali Golkar dengan menempatkan Harmoko sebagai ketua umumnya meskipun mendapat tentangan dari tentara.¹¹⁹ *Ketiga*, dilakukannya penataan ulang jajaran elit militer.

Elit tentara menjadi 'sasaran' krusial bagi Soeharto dalam merekonsolidasi kekuasaannya. Sikap oposan mereka cukup membuat Soeharto repot karena sasarannya mulai merambah Lembaga Kepresidenan, bisnis keluarga serta kroninya, di samping mendukung diam-diam gerakan mahasiswa anti Soeharto. Soeharto kemudian mengambil berbagai langkah untuk kembali mengendalikan militer. Hanya saja langkah-langkah tersebut bersifat destruktif bagi sistem kelembagaan maupun profesionalisme militer. Buah dari langkah-langkah Soeharto tersebut memiliki implikasi yang luas terhadap kelembagaan militer pada masa pasca Orde Baru. Adapun langkah-langkah Soeharto tersebut di antaranya adalah: *Pertama*, Soeharto melakukan deinstitutionalisasi dan personalisasi tentara —yang pada intinya mengalihkan kesetiaan korps militer kepada dirinya pribadi— dengan kembali menyingkirkan para perwira yang dianggap tidak memiliki loyalitas pribadi padanya. Mereka yang tersingkirkan dalam periode ini umumnya adalah yang bersikap kritis dan dipandang dekat dengan Moerdani.¹²⁰ Mereka

¹¹⁷ Lihat 'Saat Munas Memilih Sipil', *TEMPO* 30 Oktober 1993.

¹¹⁸ Max Lane, 'The Armed Forces Win The Race for Vice President', *INSIDE INDONESIA* Maret 1993.

¹¹⁹ Lihat 'Saat Munas Memilih Sipil', *TEMPO* 30 Oktober 1993.

¹²⁰ Sebelum meninggalkan posnya, Moerdani sempat menempatkan ataupun mempersiapkan beberapa orang kepercayaannya, —yang terutama berlatar belakang pasukan komando, intelijen ataupun operasi di Timor-Timur— pada beberapa jabatan kunci, di antaranya

disingkirkan secara bertahap dalam beberapa kali gelombang mutasi yang sarat dengan kepentingan politik Soeharto.¹²¹

Soeharto juga mengubah pola dukungan dari militer, kini ia mulai membangun klik kecil perwira yang mau memberikan

adalah Laksdya Soedibjo Rahardjo (Kasum ABRI atau jabatan nomor dua di lingkungan ABRI) adalah 'orang BAIS', dan pernah menjadi pembantu Moerdani cukup lama di bidang intelijen. Lihat The Editors, 'Current Data', *INDONESIA* # 53 edisi April 1992; Pangkostrad dipegang oleh Letjen Adolf Sahala Radjaguguk yang pernah lama menjadi instrumen Moerdani di Timor-Timur. Lihat Ben Anderson, 'Current Data', *INDONESIA* # 45 edisi April 1988. Setelah pergantian Moerdani, Radjaguguk menjadi Wakil KSAD yang ditinggalkan oleh Jend. Edy Sudradjat yang kemudian menjadi KSAD. Lihat Ben Anderson, 'Current Data', *INDONESIA* # 48 edisi Oktober 1989; Pangdam Jaya adalah Mayjen Soegito yang merupakan salah seorang 'anak asuh' Moerdani. Sebelumnya ia merangkap dua jabatan: Kopur Linud Kostrad dan Pangkolakops Timor-Timur. Lihat Ben Anderson, 'Current Data', *INDONESIA* # 45 edisi April 1988. Tak lama kemudian Soegito menjadi Pangkostrad menggantikan Radjaguguk. Lihat Ben Anderson, 'Current Data', *INDONESIA* # 48 edisi Oktober 1989. Dalam biografinya Moerdani disebutkan bahwa Letkol Soegito adalah salah seorang yang diajak Moerdani membicarakan rencana operasi 'pembebasan Dili'. Konon pasukan komando yang dipimpin Letkol Soegito dalam merebut sasaran operasi, akan "...di drop (diterjunkan dengan parasut) sendirian..." di Dili selama 24 jam. Lihat Pour, *Op. Cit.*; Sementara itu Kasdam Jaya yang baru, Brigjen Arie Sadewo, juga berlatar belakang intelijen karena sebelumnya adalah kepala direktorat di BAIS. Lihat Ben Anderson, 'Current Data', *INDONESIA* # 45 edisi April 1988. Ka Bakin adalah Mayjen Soedibjo yang pernah bekerja dengan Moerdani di intelijen, baik di markas besar, Kopkamtib maupun di Bais. Lihat 'Soedibjo Mengganti Yoga', *TEMPO* edisi 10 Juni 1989; KSAL Laks. Muh. Arifin adalah pembantu Moerdani di bidang intelijen yang pernah menjadi Direktur C Bais. Lihat 'KSAL Baru. Dari Kapal ke Kepala Staf', *TEMPO* 1 April 1988. Sementara itu dalam jajaran 'non tempur' terdapat Ketua F-ABRI dan Assospol Kassospol ABRI dan belakangan dipromosikan sebagai Kassospol, Mayjen Harsudiono Hartas dan beberapa 'vokalis' parlemen yang lain; Gubernur Lemhanas Mayjen Soebijakto Prawirosoebroto pernah menjadi pembantu Moerdani di bidang intelijen dan sempat disebut sebagai 'orang nomor 2' dalam intelijen. Lihat The Editors, 'Current Data', *INDONESIA* # 37 edisi April 1984. Kedua tokoh tersebut cukup aktif melontarkan berbagai opini ke tengah-tengah publik, seputar keterbukaan maupun pembaharuan. Sementara KSAD Jend. Edy Sudradjat, walaupun sulit dikatakan sebagai orangnya Moerdani, adalah sesosok figur yang kritis pada Soeharto dan dihormati oleh para perwira. Warna aslinya sebagai seorang perwira yang tak mau didikte akan segera terlihat setelah menjadi KSAD, misalnya dengan tetap mengijinkan Moerdani menempati posnya di Bais. Lihat The Editors, 'Current Data', *INDONESIA* # 58 edisi Oktober 1994. Edy juga termasuk bukan kelompok 'mantan ajudan', melainkan seorang *teamplayer* dan 'penembak langsung' yang kekuatannya berasal dari 'kepercayaan komando' dan rasa hormat dari kalangan perwira bawahannya. Lihat The Editors, 'Current Data', *INDONESIA* # 55 edisi April 1993.

¹²¹ Hal ini terjadi ketika Soeharto tanpa pertimbangan dari Pangab Feisal Tandjung maupun prosedur formal melalui Wanjakti melakukan mutasi besar-besaran pada awal 1994. Lihat 'Mutasi Mengejutkan di Cilangkap', *EDITOR* 27 Januari 1994.

dukungan politik. Dalam periode ini mereka yang pernah menjadi ajudannya atau berkekerabat dengannya mendapatkan kesempatan lebih dalam hal kepangkatan maupun jabatan.¹²² Soeharto juga memainkan kartu agama dengan cara menaikkan para perwira 'santri' sebagai antithesis terhadap para perwira Moerdani.¹²³ Ini tampaknya merupakan salah satu cara Soeharto melemahkan ikatan dan disiplin korps perwira.¹²⁴ Melonjaknya karier seorang perwira karena alasan-alasan politis selain hanya akan menimbulkan rasa iri juga merusak disiplin organisasi dan profesionalisme militer.¹²⁵

Kedua, Selain merekonfigurasi para perwira, Soeharto juga merestrukturisasi Bais, yang diubah menjadi BIA (Badan Intelijen ABRI) pada awal 1994.¹²⁶ Organisasi BIA dibuat lebih ramping, dan peranannya diperkecil.¹²⁷ BIA tidak lagi dipimpin langsung oleh Pangab, melainkan Asintel Kasum ABRI sekaligus sebagai kepalanya. Ka BIA tidak bertanggung jawab langsung kepada Pangab sebagaimana Waka Bais.¹²⁸ Ka BIA akan membawahi langsung lima

¹²² Pada periode ini ipar Soeharto, Wismoyo Aris Munandar menjadi sorotan publik karena laju kariernya yang luar biasa. Lihat Robert Cribb, 'The Guessing Game', *INSIDE INDONESIA*, Juni 1993. Menantu Soeharto, Prabowo Subiyanto juga demikian. Lihat misalnya Jun Honna, 'Military Ideology in Response to Democratic Pressure during The Late Suharto Era: Political and Institutional Context' dalam *INDONESIA* # 67 edisi April 1999.

¹²³ Puncak dari 'Islamisasi' tentara ini ditandai dengan adanya duet kepemimpinan tentara antara Pangab Feisal Tandjung dan KSAD R. Hartono pada pertengahan 1990-an. Lihat misalnya Honna, 'Ibid.' Moerdani sendiri adalah seorang Katolik. Pada jamanjaya ia menjadi instrumen represi Soeharto terhadap kekuatan-kekuatan Islam, misalnya peristiwa Priok 1984, Woyla dan sebagainya. Dalam lingkup yang lebih luas ini merupakan bagian dari politik akomodasi Soeharto terhadap 'umat Islam', dan dengan cara ini ia mendapatkan dukungan politik dari kalangan Islam dan sekaligus makin mengendalikan militer.

¹²⁴ Lihat The Editors, 'Current Data', *INDONESIA* # 53 edisi April 1992.

¹²⁵ Lihat Honna, 'Op.Cit.' Hal ini juga yang terjadi dalam kasus Kol. Bambang Supeno tahun 1952 yang berujung dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Lihat Sundhaussen, *Op. Cit.*

¹²⁶ Lihat 'Hanya Ganti Baju?', *EDITOR* 27 Januari 1994.

¹²⁷ Yakni sebatas memberikan saran bagi tindakan pencegahan terhadap gangguan stabilitas politik, ekonomi dan sosial. Lihat 'Format Baru di Markas Tebet', *TEMPO* 22 Januari 1994.

¹²⁸ Lihat 'Hanya Ganti Baju?', *EDITOR* 27 Januari 1994.

Kepala Direktorat dan satuan-satuan tugas khusus.¹²⁹ Dengan begitu BIA tidak lagi menjadi lembaga tersendiri yang dibawah oleh pangab dan tidak lagi memiliki akses ke mana-mana sebagaimana Bais.¹³⁰

Selama ini Bais dapat dikatakan sebagai salah satu institusi terkuat ketentaraan, terlebih pada saat Moerdani menjadi Pangab (1983 - 1988). Bais bukan saja memiliki kewenangan dan bidang tugas yang amat luas, namun juga menjadi *fast track* dalam karier militer. Banyak alumninya yang memangku jabatan strategis dalam kemiliteran.¹³¹ Secara pribadi Moerdani memang memiliki pengaruh amat kuat di Bais. Bahkan pada saat tidak lagi menjadi Pangab (sebagai Menhankam), ia masih menerima laporan dari Waka Bais Mayjen M.I. Soetarjo.¹³²

Selain restrukturisasi, sebelumnya juga terjadi pergantian personalia di Bais dalam rangka 'De-Moerdanisasi' ketika Arie Sudewo diangkat menjadi Waka Bais menggantikan M.I. Soetarjo.¹³³ Arie Sudewo pun segera mengukuhkan pengaruhnya, sekaligus menghabiskan 'orang-orang Moerdani' yang masih tersisa.¹³⁴ Dengan demikian terlepas dari alasan formal maupun 'tuntutan obyektif' atas restrukturisasi Bais, dimensi politiknya sangat sulit dihindarkan.

¹²⁹ Berbeda dengan Ka Bais yang harus 'melewati' Waka Bais untuk membawahi delapan kepala direktorat dan satuan-satuan tugas khusus. Lihat 'Format Baru di Markas Tebet', *TEMPO* 22 Januari 1994.

¹³⁰ Lihat 'Ibid.'

¹³¹ Misalnya mantan KSAL Moh. Arifin, Teddy Rusdy Hayuni, Ka Bakin Letjen (Purn) Soedibjo, Pangdam Jaya Mayjen A.M. Hendro Priyono, serta Danjen Kopassus Brigjen Agum Gumelar. Lihat 'Ibid.'

¹³² Lihat 'Ibid.'. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Moerdani masih kuat pada jajaran intelijen. Sungguh tidak lazim apabila seorang Menhankam, yang sejak 1983 tidak lagi menangani operasional militer, masih menerima laporan intelijen secara rutin. Seharusnya Waka Bais Mayjen M.I. Soetarjo cukup melapor para Pangab Try Sutrisno. Dikabarkan bahwa setelah tidak lagi menjadi Pangab dan menjadi Menhankam, Moerdani masih memiliki meja di Markas Bais di Tebet, dan masih sering 'berkantor' di sana.

¹³³ Lihat 'Siliwangi. Dari Kasdam Wirabuana', *EDITOR*, 26 Januari 1991. Dengan demikian, Soeharto secara bertahap telah berhasil memotong pengaruh Moerdani pada jajaran intelijen. Meskipun Arie Sadewo sendiri juga 'alumnus' Bais dan mantan pembantu Moerdani, ia adalah teman ipar Soeharto Wismoyo Arismunandar. Tersingkirnya M.I. Soetarjo merupakan 'kemenangan' besar bagi Soeharto. Pengaruh Moerdani di intelijen tinggal di Bakin yang dipimpin oleh Soedibjo dan Soeharto sebagai wakilnya.

¹³⁴ Di antaranya dilakukan di paruh awal 1992 ketika beberapa pejabat kepala direktorat diganti diam-diam, dengan memanfaatkan insiden Dili. Lihat 'Mutasi di Bais. Mutasi

Kebijakan ini sulit menghindari anggapan sebagai upaya penghapusan pengaruh Moerdani atas militer, khususnya pada jajaran intelijen.

Ketiga, Soeharto juga melakukan penghancuran 'imunitas' militer yang diawali dengan membiarkannya menjadi tertuduh dalam peristiwa Dili 1991. Peristiwa ini menandai hilangnya kekebalan hukum militer dalam menjalankan tugasnya.¹³⁵ Dalam peristiwa itu sendiri beberapa personel militer harus dihukum dan diberhentikan, termasuk Pangdam Udayana Sintong Panjaitan dan Pangkolaksop Timor Timur Warrow.¹³⁶ Dalam peristiwa ini Soeharto tampak menunjukkan 'kekuatannya' dengan tidak melindungi militer dari bulan-bulanan. Hal ini juga merupakan pencitraan buruk atas tentara untuk pertama kalinya sejak tahun 1945.

Akhir Perseteruan: *Nothing To Gain*

Tak ada hal positif bagi demokrasi yang dihasilkan dari oposisi oleh militer dan kontra oposisi oleh Soeharto: Perseteruan antara mereka sangat elitis dan berada dalam kerangka sistem politik otoritarian, serta sama-sama bersifat destruktif baik terhadap ketentaraan maupun sistem politik. *Civil society* tetap terpinggirkan hanya sebagai penonton di luar arena. Siapa pun yang bakal menang, tak akan memberikan pengaruh positif pada penegakan demokrasi

Tiga Brigjen', *EDITOR* 28 Maret 1992.

¹³⁵ Setelah insiden Dili, beberapa personel militer juga ditindak karena teribat penembakan di Nipah Madura yang menewaskan beberapa penduduk sipil. Lihat 'Yang Ditindak dan Yang Pasrah', *TEMPO* 23 Okt. 1993.

¹³⁶ Untuk lengkapnya lihat Dwi Pratomy Yulianto, 'Di Balik Insiden Penembakan di Dili 12 November 1991. Sebuah Episode Reokupasi Tentara oleh Soeharto' *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. IX No. 12, FISIPOL Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, Agustus 2002. Penyingkiran Sintong, yang dipandang sebagai 'KSAD masa depan', dan Warouw yang keduanya dipandang sebagai 'orangnya Moerdani' merupakan berkah tersendiri bagi Soeharto. Ini mempermudah jalan Wismoyo menjadi KSAD. Pangkostrad Wismoyo seharusnya juga ditindak karena keterlibatan satuan-satuan yang ia pimpin. Namun dalam Kostrad, hanya para komandan lapangan yang tersingkir, kecuali Prabowo dan Sjafrie. Lihat Douglas Kammen, 'Notes on The Transformation of The East Timor Military Command', *INDONESIA* # 67 April 1999. Tersingkirnya Sintong dan Warouw serta naiknya Wismoyo dan Prabowo serta kelompoknya makin mempermudah Soeharto

di Indonesia. Pengaruhnya pada profesionalisme dan disiplin militer pun tak kalah menyedihkannya.

Pertama, bahwa oposisi berseragam ini untuk kesekian kalinya menandai buruknya hubungan sipil-militer di Indonesia. Pada tingkat tertentu hal ini adalah pengulangan dari peristiwa 3 Juli 1946, peristiwa 17 Oktober 1952, peristiwa 27 Juni 1955 dan sebagainya — yang sialnya menjadi preseden, ketika militer melakukan perlawanan terhadap pemerintahan sipil karena merasa otoritas dan klaim-klaim kelembagaannya diintervensi.¹³⁷ Sebagaimana telah disinggung di depan, oposisi berseragam ini juga dipicu dengan langkah-langkah politik Soeharto yang dianggapkan bukan saja telah mengintervensi urusan internal dalam pengerian klasik, namun juga dianggap berusaha mematahkan 'klaim-klaim historis' mereka atas penguasaan ekonomi, politik dan pemerintahan Orde Baru.¹³⁸ Kekhawatiran bahwa peristiwa ini masih akan berulang pada masa-masa pasca Orde Baru bukanlah ilusi,¹³⁹ karena kultur penghargaan terhadap supremasi sipil sepertinya masih sangat langka dalam kehidupan militer.

Kedua, sedangkan gerakan kontra oposisi yang dilancarkan Soeharto juga tak kalah destruktifnya terhadap kelembagaan militer. Personalisasi dan de-institusionalisasi yang dilakukannya bukan sekedar merusak disiplin organisasi dan profesionalisme, serta semakin memecah belah militer, namun juga berakibat pada bergesernya secara drastis peranan tentara dari *khitahnya* sebagai pengawal nasional di awal kelahirannya menjadi sekedar pengawal kekuasaan Soeharto pada akhir Orde Baru.¹⁴⁰ Korps militer menjadi terkotak-kotak sepanjang garis afiliasi-afiliasi pribadi dengan

menguasai kembali tentara.

¹³⁷ Lihat Yulianto, *Pengaruh Aspek...*

¹³⁸ Dalam pengertian klasik profesionalisme militer, jelas bahwa klaim militer selain aspek pertahanan nasional tidak dapat diterima. Namun hal ini harus dipahami dalam kontes Regim Orde Baru.

¹³⁹ Misalnya dengan perlawanan politik oleh TNI AD terhadap politisasi militer oleh Presiden Abdurrahman Wahid melalui penggelaran 'apel kesiagaan' pada 20 Mei 2001. Lihat *KORAN TEMPO* 21 Mei 2001.

¹⁴⁰ Contoh paling esktrim adalah peristiwa 27 Juli 1996, serta kasus penculikan para aktivis anti Soeharto oleh Prabowo dan kelompoknya yang konon dilakukan tanpa sepengetahuan

Soeharto.¹⁴¹ Promosi pun kemudian didasarkan pada pendekatan favoritisme, bukannya kecakapan profesional. Persaingan karier yang tidak sehat ini tentu saja hanya menimbulkan ketidaksenangan atas diri mereka yang diabaikan, dan keprihatinan pada mereka memiliki kepedulian pada profesionalisme militer.¹⁴²

Hal ini secara tak langsung juga berakibat pada makin merosotnya kualitas kerja aparat pertahanan dan keamanan nasional yang ditandai dengan seringnya timbul kerusuhan di Indonesia sejak pertengahan 1990-an. Besar kemungkinan hal ini merupakan salah satu akibat dari pemandulan intelijen secara kelembagaan maupun personal (dalam rangka De-Moerdanisasi) sehingga mereka gagal memberikan *early warning* atas kemungkinan timbulnya kekacauan. Akhirnya buah dari semua ini mencuat ke permukaan menjelang dan pasca kejatuhan Soeharto. Kronisnya fragmentasi di kalangan korps perwira berujung kekacauan pada manajemen keamanan dalam negeri, dan salah satunya berakibat pada melayangnya ribuan jiwa dalam kerusuhan Mei 1998.

Penutup

Dengan demikian ikhtiar untuk menegakkan supremasi sipil sekaligus profesionalisme militer adalah tugas bersama sebagai anak bangsa di masa pasca Orde Baru ini. Banyak memang yang masih harus dilakukan: masalah anggaran, peninjauan ulang atas keberadaan komando teritorial, sampai dengan kurikulum pendidikan militer. Namun dalam kaitannya dengan oposisi berseragam dan kontra oposisi ini, satu hal terpenting adalah adanya sebuah peraturan yang memberikan batasan tegas antara kewenangan antara elit sipil dan militer. Karena persoalannya saat ini bukan sekedar bagaimana 'mengeluarkan militer' dari urusan non pertahanan, namun juga bagaimana dibangun saling pengertian dan saling menghormati batas-batas otonomi internal masing-masing agar

Pangab. Lihat Honna, 'Op.Cit.'

¹⁴¹ Misalnya dengan adanya kelompok Hartono, Tandjung, Prabowo dan Wiranto yang masing-masing memiliki akses lancar ke Soeharto. Lihat misalnya Honna, 'Tbid.'

¹⁴² Lihat Honna, 'Tbid.'

tak ada lagi saling intervensi antara sipil dan militer hanya demi kepentingan politik jangka pendek sebagaimana sering terjadi di masa lalu. Tentu saja semua itu harus dibangun di atas landasan dan semangat paradigma baru, demokratisi. ***

Daftar Pustaka

- Aditjondro, Goerge Junus (1998). *Yayasan-yayasan Soeharto: Cakupan, Dampak dan Pertanggung-jawabanny*. Tanpa penerbit, New Castle.
- Anderson, Benedict./The Editors, 'Current Data on The Indonesian Military Elite', *INDONESIA*, berbagai edisi.
- Aspinall, E. (1995). 'Student and The Military : Regime Friction and Civilian Dissent in The Late Soeharto Period.' *INDONESIA* # 59 April.
- Cribb, Robert, (1993). 'The Guessing Game.' *INSIDE INDONESIA*, Juni.
- Crouch, Harold, (1986). *Militer dan Politik di Indonesi*. Terj. Th Sumarthana, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan,
- Crouch, Harold, (1988). 'Military-Civilian Relation in Indonesia in The Late Soeharto Era.' *THE PASIFIC REVIEW* Vol I #04, Oxford University Press.
- Dwipayana, G. dan K.H., Ramadhan, (1989). *Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Hefner, Robert W. (1995). *ICMI dan Perjuangan Kelas Menengah Indonesia*. Terj. Endi Haryono, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Honna, Jun, (1999). 'Military Ideology in Response to Democratic Pressure during The Late Suharto Era: Political and Intitutional Context' dalam *INDONESIA* # 67 edisi April 1999.
- Jackson, Karl D. (1978). 'Bureaucratic Polity: A Theoritical Framework for The Analysis of Power and Communication in Indonesia.' Dalam Karl D. Jackson dan Lucian W. Pye (Eds). *Political Power and Communication in Indonesia*. University of California Press, Berkeley, Los Angeles-London.

- Jenkins, David, (1984). *Soeharto and His General. Indonesian Military Politics 1975-1983*. New York: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, Ithaca.
- Kammen, Douglas, (1999). 'Notes on The Transformation of The East Timor Military Command.' *INDONESIA* # 67 April.
- Lane, Max, (1989). 'Challenge to Soeharto. Update on Recent Development.' *INSIDE INDONESIA* Oktober.
- Lane, Max, (1991). 'Suharto Checks 'Opennes'', *INSIDE INDONESIA* Oktober.
- Lastomo, Agus Tri, (1997). *Politik Akomodasi. Studi tentang Hubungan Umat Islam dengan Pemerintah Orde Baru Pasca 1990 dan Prospek Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Skripsi Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, tidak diterbitkan.
- Liddle, Raymon William, (1996). 'Soeharto's Indonesia: Personal Rule and Political Institution.' Dalam R. William Liddle (ed), *Leadership and Culture in Indonesian Politics*. Sidney: Asian Studies Association of Australia dan Allen&Unwin.
- MacDougall, John A. (1982). 'Pattern of Military Control in The Indonesian Higher Central Bureaucracy.' *INDONESIA* # 33 April.
- MacFarling, Ian, (1996). *The Dual Function of The Indonesian Armed Forces. Military Politics in Indonesia*, Australia: Australian Defence Studies Centre.
- MacIntyre, Andrew, (1991). *Business and Politics in Indonesia*, Australia: Asian Studies Association of Australia dan Allen&Unwin.
- Mas'oed, Mohtar, (1989). *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966 - 1971*. Jakarta: LP3ES.
- Pangaribuan, Robinson, (1996). *The Indonesian State Secretary 1945-1993*. Jakarta: Asia Research Centre on Social, Political and Economic Change Murdoch University dan Pustaka Sinar Harapan.
- Pangestu, Mari, (1996). *Economic Reform, Deregulation and Privatization. The Indonesian Experience*. Jakarta: CSIS.
- Pour, Julius, (1993). *Benny Moerdani. Profil Prajurit Negarawan*. Jakarta: Yayasan Keuangan Panglima Besar Sudirman.
- Robison, Richard, (1978). 'Toward A Class Analisis of The Indonesian Military Bureaucratic State.' *INDONESIA* # 25 edisi April.

- Robison, Richard, (1986). *Indonesia. The Rise of Capital*. Sydney: Allen&Unwin dan Asian Studies Association of Australia.
- Robison, Richard, (1993). 'Indonesia: Tension in State and Regime.' Dalam Richard Robison dan Kevin Hewison (eds). *Southeast Asia in The 1990s: Authoritarianism, Democracy and Capitalism*. Sydney: Allen&Unwin.
- Robison, Richard, (1998). 'Pengembangan Industri dan Ekonomi-Politik Pengembangan Modal : Indonesia.' Dalam Ruth T. McVey (ed), *Kaum Kapitalis Asia Tenggara: Patronase Negara dan Rapuhnya Struktur Perusahaan*. terj. A. Setiawan Abadi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Samego, Indria, (1998). *Bila ABRI Berbisnis. Buku Pertama yang Menyingkap Data dan Kasus Penyimpangan dalam Praktik Bisnis Kalangan Militer*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Schwarz, Adam, (1994). *A Nation in Waiting. Indonesia in The 1990s*. Sydney: Allen&Unwin.
- Sudarmanto, (1997). *Analisis Dampak Kebijakan Deregulasi Industri dan Investasi di Indonesia. Suatu Studi tentang Dampak dari Kebijakan Deregulasi Industri dan Investasi terhadap Kinerja dan Struktur Industri Manufaktur di Indonesia pada Periode 1984 – 1995*. Yogyakarta: Skripsi Jur.Adm. Negara FISIPOL UGM, tidak diterbitkan.
- Sudharmono, (1997). *Pengalaman dalam Masa Pengabdian. Sebuah Otobiogra*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,
- Sundhaussen, Ulf, (1988). *Politik Militer di Indonesia 1945 – 1967. Menuju Dwi Fungsi ABRI*, terj. Hasan Basari, Jakarta: LP3ES.
- Suryadinata, Leo, (1992). *Golkar dan Militer. Studi tentang Budaya Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Vatikiotis, Michael R.J. (1993). *Indonesian Politics Under Suharto. Order, Development and Pressure for Change*. London and New York: Routledge.
- Wijono, Karto, (1990). 'Letter from Jakarta.' *INSIDE INDONESIA* Desember.
- Winters, Jeffrey A. (1996). *Power in Motion. Capital Mobility and The Indonesian State*. Ithaca dan London: Cornell University Press.
- Yulianto, Dwi Pratomo, (2001). *Pengaruh Aspek Intervensi Pihak Luar dan Aspek Kepemimpinan Terhadap Resistensi Politik TNI. Sebuah*

Studi tentang Perilaku Politik Militer Indonesia pada Masa Perang Kemerdekaan Awal 1950-an dan Akhir 1980-an, Yogyakarta: Skripsi pada Jur. Pemerintahan FISIPOL UGM, tak diterbitkan,.

Yulianto, Dwi Pratomo, (2002). 'Di Balik Insiden Penembakan di Dili 12 November 1991. Sebuah Episode Reokupasi Tentara oleh Soeharto' *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. IX No. 12, Yogyakarta: FISIPOL Universitas Muhammadiyah, edisi Agustus.